



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut **LPPD** adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

Penyusunan LPPD setiap tahun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menerapkan otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan. Nantinya melalui laporan inilah pemerintah (pusat) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah, khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) itu sendiri memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Dasar Penyusunan LPPD tahun 2020 adalah peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan EPPD



serta Surat Edaran Mendagri Nomor 120.04/6931/otda tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020.

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

a. Dasar Pembentukan Daerah

1. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan ProVinsi Sumatera Utara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.

b. Sejarah Berdirinya Kerajaan Langkat

Berdirinya kerajaan langkat, oleh tim peneliti sejarah kabupaten langkat, dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi penetapan hari jadi kabupaten langkat dalam pesfektif pemerintahannya. Oleh karena itu penelusuran akar sejarah diawali dengan mengungkap peristiwa – peristiwa yang terjadi sebelum berdirinya kerajaan langkat.

Menurut terombo langkat yang kami kutip dari buku “Sari Serdang” karangan **Prof. T. Lukman Sinar** disebutkan bahwa leluhur dinasti langkat yang terjauh diketahui bernama dewa syahdan yang hidup lebih kurang tahun 1500 - 1580. Dewa syahdan digantikan oleh puteranya dewa sakti yang memerintah ditahun 1580 – 1612 dewa sakti selanjutnya diganti oleh Sultan Abdullah atau lebih dikenal dengan marhum guri, selanjutnya beliau digantikan oleh puteranya yang bernama raja kahar yang lahir lebih kurang ditahun 1673.



Raja Kahar inilah yang mendirikan kerajaan langkat, yang lebih kurang pada saat itu berusia 77 tahun, dengan membuka perkampungan di kota dalam, yang terletak antara stabat dan kampung inai (hinai), berbatasan dengan sungai karang gading di kecamatan secanggang.

Untuk mengungkap kapan Raja Kahar tersebut membuka kota dalam, sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan langkat, maka tim peneliti menelusuri dengan berpedoman kepada adat dan tradisi masyarakat melayu langkat dalam memilih dan menetapkan " Hari Baik dan Bulan Baik " dalam membuka hutan, mendirikan rumah, mengadakan pesta dan sebagainya adalah tanggal 12 rabiul awal.

Berpedoman kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat melayu langkat tersebut, maka Raja Kahar dalam mendirikan kota dalam, sebagai cikal bakal kerajaan langkat bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal 1163 H atau bertepatan tanggal 17 Januari 1750 M, sehingga disimpulkan bahwa hari jadi kabupaten langkat jatuh pada tanggal 17 Januari 1750. Sementara itu, nama langkat itu sendiri diambil dari nama sejenis pohon yang dikenal oleh penduduk melayu dengan sebutan " **Pohon Langkat** ". Dahulu pohon ini banyak tumbuh disekitar sungai di langkat, namun saat ini pohon langkat ini sudah langka dan hanya dijumpai di hutan – hutan pedalaman daerah langkat. Pohon ini menyerupai pohon langsung, tetapi rasa buahnya pahit dan kelat. Oleh karena pohon ini banyak tumbuh disekitar sungai yang menjadi pusat kerajaan, maka kerajaan ini lebih populer disebut kerajaan langkat.

c. Lambang Daerah

Pengertian Lambang (Bentuk Lambang)



1. Sebuah bintang berwarna emas dan kuning gading melambangkan dasar falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila
2. Perisai berwarna kuning gading dan dua buah bambu warna kuning gading melambangkan



perjuangan rakyat mencapai kemerdekaan RI yang berdasarkan Pancasila

3. Untaian padi dan kapas (17 dan 8) melambangkan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 dan keseluruhannya melambangkan kesejahteraan rakyat
4. Tepak sirih warna coklat muda dan hiasan coklat tua melambangkan kebudayaan dan adat istiadat Langkat
5. Sampan nelayan dengan warna layarnya coklat muda dan badannya warna hitam melambangkan bahwa daerah Langkat berpantai luas rakyat bersemangat bahari.
6. Keris warna putih dan gagangnya berwarna coklat tua, melambangkan semangat patriotisme rakyat Langkat
7. Pita berwarna merah tulisan "Kabupaten Langkat" berwarna putih menyatakan Daerah Langkat

Arti Warna :

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Hijau | : | Lambang kemakmuran |
| 2. Kuning Emas | : | Lambang kebesaran jiwa dan kemurnian adat |
| 3. Kuning Gading | : | Lambang kejayaan |
| 4. Merah | : | Lambang semangat yang menyala-nyala |
| 5. Biru | : | Lambang kecintaan kesetiaan pada tanah air |
| 6. Putih | : | Lambang kesucian dan kemurnian |
| 7. Coklat | : | Lambang kepribadian/kesuburan tanah Langkat |
| 8. Hijau | : | Lambang Kejujuran dan Keteguhan |

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"–4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00" – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4–105 m dari permukaan laut dengan luas wilayah 6.263,29Km² (626.329 Ha).



Tabel 1
Luas Daerah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
Bahorok	Pekan Bahorok	1 101,83
Sirapit	Sidorejo	98,50
Salapian	Minta kasih	221,73
Kutambaru	Kutambaru	236,84
Sei Bingai	Namu Ukur Selatan	333,17
Kuala	Pekan Kuala	206,23
Selesai	Pekan Selesai	167,73
Binjai	Kwala Begumit	42,05
Stabat	Stabat Baru	108,85
Wampu	Bingai	194,21
Batang Serangan	Batang Serangan	899,38
Sawit Seberang	Sawit Seberang	209,10
Padang Tualang	Tjg. Selamat	221,14
Hinai	Kebun Lada	105,26
Secanggang	Hinai Kiri	231,19
Tanjung Pura	Pekan Tanjung Pura	179,61
Gebang	Pekan Gebang	178,49
Babalan	Pelawi Utara	76,41
Sei Lapan	Alur Dua	280,68
Berandan Barat	Tangkahan Durian	89,80
Besitang	Pekan Besitang	720,74
Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	151,35
Pematang Jaya	Limau Mungkur	209,00
Kabupaten Langkat		6 263,29

Sumber Data : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2021



Kabupaten Langkat terletak dibagian utara dan di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang mempunyai batas-batas administratif Kabupaten Langkat antara lain :

- sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka,
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo,
- sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh,
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang & Kota Binjai,

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Langkat dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, khususnya untuk pantai Timur Sumatera Bagian Utara, yakni jalur Medan – Banda Aceh. Kabupaten Langkat juga berada di jalur lalu lintas jalan Propinsi poros Binjai – Bukit Lawang yang merupakan jalur wisata alam dan konservasi TN Gunung Leuser.

Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu :

- Langkat Hulu seluas 211.029 ha., wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai.
- Langkat Hilir seluas 250.761 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura.
- Teluk Aru seluas 164.539 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Berandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya.



Tabel 2
Pembagian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Langkat

No.	Kecamatan	Ibu Kecamatan	Banyaknya		Luas	
			Desa	Kel.	Km ²	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bahorok	Pkn Bahorok	18	1	1.101,83	17,59
2	Sirapit	Sidorejo	10	0	98,5	1,57
3	Salapian	Minta Kasih	16	1	221,73	3,54
4	Kutambaru	Kutambaru	8	0	234,84	3,78
5	Sei Bingei	Namu Ukur Selatan	15	1	333,17	5,32
6	Kuala	Pkn Kuala	14	2	206,23	3,29
7	Selesai	Pkn Selesai	13	1	167,73	2,68
8	Binjai	Kwala Begumit	6	1	42,05	0,67
9.	Stabat	Stabat Baru	6	6	108,85	1,74
10.	Sei Wampu	Bingai	13	1	194,21	3,10
11	Batang Serangan	Batang Serangan	7	1	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	Sawit Seberang	6	1	209,10	3,34
13	Padang Tualang	Tjg. Selamat	11	1	221,14	3,53
14	Hinai	Kebun Lada	12	1	105,26	1,68
15	Secanggang	Hinai Kiri	16	1	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	Pkn. Tanjung Pura	18	1	179,61	2,87
17	Gebang	Pkn Gebang	10	1	178,49	2,85
18	Babalan	Pelawi Utara	4	4	76,41	1,22
19	Sei Lapan	Alur Dua	9	5	280,68	4,48
20	Berandan Barat	Tangkahan Durian	5	2	89,80	1,43
21	Besitang	Pkn Besitang	6	3	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	9	2	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	Limau Mungkur	8	0	209,00	3,34
JUMLAH			240	37	6.263,29	100

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka tahun 2020

b. Topografi

Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu



sungai, dengan ketinggian antara 0-1.200 m dpl, dengan garis pantai sepanjang 110 km. Bagian Timur Laut berada disepanjang pantai Selat Malaka, topografi relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian Timur laut disekitar Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Gebang. Daerah tersebut rata-rata memiliki ketinggian 0-4 m dpl, meliputi Kecamatan Pematang Jaya, Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lapan, Babalan, Gebang, Tanjung Pura dan Secanggang.

Bagian Barat sampai dengan Barat Daya relatif datar sampai berbukit dengan ketinggian 0- 30 m dpl. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Stabat, Binjai, Hinai, Wampu, Padang Tualang, Selesai, Sawit Seberang, sebagian Sei Lapan, Sebagian Besitang, Sebagian Kuala, dan Sebagian Sei Bingai.

Daerah yang berbatasan dengan Karo, Aceh Tenggara dan Gayo Lues bergelombang sampai bergunung yang relatif terjal, dengan ketinggian antara 30 – 1200 m dpl. Daerah tersebut merupakan Hutan Lindung kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kecamatan yang termasuk daerah tersebut sebagian Besitang, Sei Lapan, Bahorok, Batang Serangan, Salapian, dan Sei Bingai.

c. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Langkat :

- Dataran sepanjang pantai terdiri dari tanah alluvial.
- Dataran rendah terdiri dari jenis glei humus rendah, hidromorf kelabu dan plarosal.
- Dataran tinggi dan perbukitan terdiri dari tanah podsolid merah kuning.

Adapun susunan batuan (geologi) di Kabupaten Langkat adalah :

- Qh = Alluvium : Kerikil, pasir dan lempung;
- Qpme = Formasi Medan : Bongkah-bongkah kerikil, pasir, lanau dan lempung;
- QTjr = Formasi Julu Rayeu : Batupasir berlapis selang-seling dan batulumpur;



- Qvt = Tufa Toba : Tufa riodasit, sebagian terlaskan;
- Qvbj = Satuan Binjai : Breksi aliran bersusun andesit sampai dasit;
- Ppbl = Formasi Batu Gamping Batumilmil : Batu gamping dan rijang;
- Pub = Formasi Bahorok : Wakemalihan, batusabak, arenit kuarsa malihan, batulanau malihan, konglomerat malihan;
- Tps = Formasi Seurela : Batupasir berirama, batulumpur dan konglomerat;
- Tuk = Formasi Keutapang : Batupasir berlapis selang-seling dan batulumpur;
- Tmb = Formasi Baong : Batulumpur (beberapa berglaukonit) dan batu pasir;
- Tob = Formasi Bruksah : Batupasir dan konglomerat.

d. Hidrologi

1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Langkat masuk dalam Wilayah Sungai Wampu-Besitang. DAS yang masuk dalam wilayah sungai tersebut meliputi DAS Damar Condong, DAS Pangkalan Susu, DAS Simpang Kiri, DAS Pardongkelan, DAS Besitang, DAS Beras Basah, DAS Tenggulun, DAS Lapan, DAS Karakunda, DAS Gebang, DAS Wampu, DAS Tanjung Ibus dan DAS Sembilan.

DAS Wampu adalah merupakan DAS terluas di wilayah Kabupaten Langkat, dengan luas areal mencapai 416,175.19Ha. Tingkat kekritisan lahan DAS Wampu mencapai 87,103.61 Ha atau 20.08 % di mana Sub DAS Lau Biang Hulu merupakan wilayah yang memiliki kekritisan lahan paling luas yaitu 25,186.16 Ha atau 25.71 % dari luasan Sub DAS Lau Biang Hulu atau 6.05% dari luasan DAS Wampu



2. Sungai

Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 buah aliran sungai besar dan kecil. Berdasarkan Klasifikasi sungai menurut Kern dalam Maryono, A., 2005, Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan masuk dalam kategori sungai besar (sungai dengan lebar lebih dari 80m), sedangkan Sungai Besitang, Sungai Musam, Sungai Lengan dan Sungai Bahorok termasuk kategori Sungai kecil (sungai dengan lebar 40m s-d 80 m), sungai-sungai yang lain termasuk kategori sungai menengah dan sungai kecil (sungai menengah dengan lebar 20m s-d 40m dan sungai kecil dengan lebar 10m s-d 20m). Keberadaan sungai tersebut merupakan potensi fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk Irigasi dan budidaya air tawar.

Tabel 3

Data Aliran Sungai di Kabupaten Langkat

No.	Nama Sungai	Luas (Km ²)	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (m)	Isi Normal (Km ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wampu	2.569	Bohorok, Salapian, Kuala, Selesai, Stabat, Binjai, Secanggang, Tg. Pura	105	100	80
2	Bt. Serangan	1.413	Pdg. Tualang, Tj. Pura	80	100	43
3	Besitang	440	Besitang	83	50	8
4	Musam	175	Pdg. Tualang	25	43	18
5	Lengan	825	Babalan	80	40	9
6	Bohorok	150	Bohorok	25	40	8
7	Mencirim	43	Binjai, Wampu	38	38	13
8	Kr, Gading	160	Secanggang, Stabat	27	30	2
9	Bekulap	134	Salapian, Kuala	40	30	10
10	Bingai	717	Sei Bingei, Binjai, Stabat	67	30	15
11	Begumit	347	Kuala, Selesai	34	30	13
12	Tenang	144	Pdg. Tualang	47	30	12
13	Dendang	160	Stabat	27	30	2
14	Bagerpang	57	Bohorok	20	25	5
15	Salapian	145	Salapian	27	25	9
16	Bekiun	94	Kuala, Salapian	25	20	6
17	Gergas	58	Bohorok, Stabat	24	15	3



18	Tembo	42	Kuala	27	15	4
19	Besilam	288	Stabat, Pdg Tualang, Binjai	45	15	13
20	Temuyuk	5	Salapian	4	10	1
21	Bengaru	15	Sei Bingei	10	10	3
22	Salaon	6	Sei Bingei	5	10	1
23	Menjahong	18	Sei Bingei, Kuala	13	10	3
24	Belengking	40	Stabat	17	10	1
25	Serapuh	40	Tanjung Pura	10	15	1
26	Alur Hitam	18	Gebang	10	10	0,5

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka tahun 2021

e. Klimatologi

Kabupaten Langkat memiliki Iklim Tropis Basah, dimana sepanjang tahun merupakan bulan basah (curah hujan diatas 100 mm³/bulan) tanpa ada bulan kering, sehingga bisa disebut hujan hampir merata sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan tertinggi untuk tiga tahun terakhir terjadi di bulan Mei yaitu 300 mm³ dan curah hujan terendah terjadi di bulan Februari yaitu 116 mm³. Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, wilayah Kabupaten Langkat termasuk tipe iklim A dimana musim kemarau terjadi pada bulan Februari-Maret dan musim hujan pada bulan September sampai dengan Februari. Curah hujan rata – rata berkisar antara 100 sampai dengan 3.000 mm pertahun. Suhu rata – rata minimum berkisar antara 23° – 25° C dan rata – rata maksimum 30° – 33° C, serta kelembaban udara relatif antara 65% – 75%.

Di Kabupaten Langkat juga terdapat fenomena alam yang disebut angin Bahorok, yaitu angin kencang dan kering yang berhembus dari arah Samudera Hindia melewati perbukitan daerah Bahorok menuju ke arah dataran rendah bagian timur. Angin tersebut biasa terjadi di pertengahan tahun.

f. Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan paling dominan di Kabupaten Langkat ialah lahan pertanian dengan luas sebesar 573.389 Ha dan persentase 75,40%. Lahan perkebunan merupakan luasan lahan paling dominan kedua dengan



luas mencapai 50,13% dari total luas wilayah kabupaten. Lahan non pertanian di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 ialah sebesar 52.940 Ha (8,45%). Lahan bukan pertanian ini termasuk jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain. Setiap tahunnya lahan bukan pertanian ini mengalami peningkatan luasan dari tahun sebelumnya. Namun tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,54 persen dari tahun 2016.

Tabel 4
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Langkat

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Non Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
	Sawah (Ha)	Bukan Sawah (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bahorok	700	105.185	4.298	110.183
2. Sirapit	1.502	7.917	431	9.850
3. Salapian	171	20.587	1.415	22.173
4. Kutambaru	0	22.870	814	23.684
5. Sei Bingai	3.089	28.793	1.435	33.317
6. Kuala	906	18.637	1.080	20.623
7. Selesai	1.221	12.437	3.115	16.773
8. Binjai	1.175	2.101	929	4.205
9. Stabat	1.342	6.758	2.785	10.885
10. Wampu	710	15.416	3.295	19.421
11. Batang Serangan	118	88.522	1.298	89.938
12. Sawit Seberang	0	19.637	1.273	20.910
13. Padang Tualang	74	19.327	2.713	22.114
14. Hinai	1.655	7.641	1.230	10.526
15. Secanggang	5.884	13.064	4.171	23.119
16. Tanjung Pura	2.738	13.507	1.716	17.961
17. Gebang	1.862	14.341	1.646	17.849



18. Babalan	4.259	2.337	1.045	7.641
19. Sei Lapan	1.426	60.708	9.960	72.074
20. Brandan Barat	1.521	5.519	194	8.980
21. Besitang	1.406	60.708	9.960	72.074
22. Pangkalan Susu	2.791	10.466	1.878	15.135
23. Pematang Jaya	803	18.672	1.425	20.900
Langkat	35.353	538.036	52.940	626.329

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka tahun 2020

g. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Pembangunan

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Langkat terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu :

- o Kawasan Langkat Hulu, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Banyak jeram-jeram berarus deras, yang layak untuk dikembangkan sebagai sumber energi listrik Mikro Hidro. Dikawasan ini terdapat potensi tambang Batu Kapur dan Batubara. Selain itu terdapat potensi wisata berupa ekowisata Bukit Lawang yang berorientasi pada kegiatan konservasi Orang Utan dan ekosistemnya.
- o Kawasan Langkat Hilir, wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Wilayah ini didominasi dataran rendah yang cocok untuk lahan budidaya pertanian. Langkat Hilir sejak jaman Belanda dikenal sebagai wilayah perkebunan besar, yang sekarang dikenal dengan PTPN (PT Perkebunan Negara II dan IV). Sehingga budaya masyarakat perkebunan masih terlihat di wilayah ini. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Batang Serangan terdapat ekowisata Tangkahan, dengan atraksi menarik Unit Patroli Gajah. Para wisatawan dapat menikmati



hiburan menaiki dan memandikan Gajah.

- Wilayah Teluk Aru, yaitu wilayah perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Di Wilayah ini merupakan daerah eksplorasi PT Pertamina yang pertama di Indonesia, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik miniatur Indonesia, mengingat karyawan PT Pertamina datang dari seluruh Indonesia. Namun potensi minyak dan gas bumi di Teluk Aru sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, maka Kilang Pertamina di Pangkalan Berandan ditutup. Penutupan Kilang ini sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Besitang juga terdapat Unit Patroli Gajah Aras Napal yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat sesuai dengan RTRW Kabupaten Langkat tahun 2013-2033 adalah:

1. Kawasan hutan produksi :

- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas sekitar 56.141 Ha. terletak di Kecamatan Bahorok; Salapian; Kutambaru; SeiBengai; Kuala; Batang Srgan; Sawit Seberang; SeiLapan; Berandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu; dan Pematang Jaya.
- Kawasan hutan produksi tetap memiliki luas sebesar 39.453 Ha, meliputi Kecamatan Secanggang; Tanjung Pura; Gebang; Babalan; SeiLapan; Brandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu dan Pematang Jaya;

2. Kawasan pertanian :

- Kawasan tanaman lahan basah, berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun



kecil dengan luas total ± 49.293 Ha.

- Kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Besitang; Bahorok; Hinai; Tanjung Pura; Sei Bingei; Binjai; Selesai; Wampu; dan Secanggang.
- Kawasan tanaman tahunan/perkebunan diarahkan meliputi seluruh kecamatan dengan luas pengembangan mencapai ± 202.485 Ha.
- Kawasan peternakan di Kabupaten Langkat meliputi:
 - a. Peternakan hewan besar; Arahkan sentra produksi Peternakan hewan besar seperti sapi potong dan kerbau meliputi Kecamatan Sei Bingei; Kuala; Selesai; Binjai; Wampu; Batang Serangan; Sawit Seberang; Padang Tualang; Hinai; Secanggang; Pematang Jaya; Stabat; Bahorok; dan Sirapit.
 - b. Peternakan hewan kecil seperti domba, kambing, dan babi meliputi: Kecamatan Selesai; Binjai; Hinai; Wampu; Padang Tualang; Sawit Seberang; Tanjung Pura; Sei Bingei; Kuala; dan Gebang.
 - c. Peternakan unggas seperti ayam dan itik meliputi: Kecamatan Binjai; Selesai; Kuala; Salapian; Tanjung Pura; dan Secanggang.
- Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Langkat meliputi:
 - a. Pengembangan perikanan laut dan budidaya (tambak), diarahkan di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, SeiLepan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang; dan
 - b. Perikanan air tawar berupa kolam potensial dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, sedangkan perikanan air tawar berupa minapadi potensial dikembangkan di lahan sawah beririgasi di Kabupaten Langkat.



- Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Langkat meliputi:
 - a. perikanan tangkap di laut diarahkan pada jalur penangkapan ikan 0 – 4 mil dari garis pantai di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lengan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang;
 - b. perikanan tangkap di Perairan Umum diarahkan di Kecamatan Kutambaru, SeiBingei, Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Padang Tualang, Stabat, Wampu, Hinai dan Tanjung Pura; dan
 - c. pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu dan didukung oleh desa-desa pesisir.
 - d. Kawasan agromarinepolitan meliputi kawasan pantai timur Kabupaten Langkat.
 - e. Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap meliputi PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Brandan dan PPI Kuala Gebang.
 - f. Pengembangan perumahan nelayan diarahkan di Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Sei Lengan, Kecamatan Babalan dan Pangkalan Susu
- 3. Kawasan pertambangan meliputi:
 - Kawasan Pertambangan rakyat berada di Kecamatan Kutambaru, Bahorok, Salapian, Kuala, Sirapit, Selesai, SeiBingei, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang, Pangkalan Susu dan Berandan Barat.
 - Kawasan Pertambangan besar meliputi:
 - a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada di Pangkalan Susu, Brandan Barat, SeiLengan, Babalan, Hinai, Padang Tualang, Secanggang dan Binjai;
 - b. Tambang Panas bumi;
 - c. Tambang Batu Bara; dan



- d. Tambang Air Tanah CAT Medan.
4. Kawasan perindustrian. Kawasan industri di Kabupaten Langkat terutama industri kecil dan menengah diarahkan diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Sedangkan industri besar dapat diarahkan dan disesuaikan dengan hasil komoditi yang ada di setiap kecamatan dengan Pusat Industri berada pada Kecamatan Pangkalan Susu.
5. Kawasan pariwisata
 - Wisata Alam (Darat) meliputi:
 - a. Pemandian dan Rehabilitasi Orang Utan, Gua Batu Kapal dan Gua Batu Rizal, Kecamatan Bahorok;
 - b. Gua, Air Terjun Marike dan Air Panas Simolap Kutambaru di Kecamatan Kutambaru
 - c. Pemandian Namu Relok, Kecamatan Salapian;
 - d. Pemandian Pangkal, Pemandian/Air Terjun Lau Berte, Pemandian Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei;
 - e. Sumber Air Panas Kuala Buluh, Kecamatan Padang Tualang;
 - f. Batu ronggeng Desa Sungai Musam dan Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan;
 - g. Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang; dan
 - h. Arung jeram Sungai Wampu dan Sungai Bingei.
 - Wisata Alam (Laut) meliputi:
 - a. Pulau Sembilan, Pantai Berawe di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu; dan
 - b. Pantai Kuala Serapu, Kecamatan Tanjung Pura.
 - Wisata Buatan meliputi:
 - a. Istana Batu Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
 - b. Pulau Kuburan Mas Merah dan Kuburan Panjang di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu;
 - c. Mesjid Azizi, Makam T. Amir Hamzah dan musium, Kecamatan



Tanjung Pura;

- d. Haul Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padang Tualang; dan
- e. Kampung Bali di Kecamatan Wampu

C. DEMOGRAFI

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 1.030.202 jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama kali pada tahun 1961, jumlah penduduk Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 62,67 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 6,2 ribu jiwa setiap tahun.

Kepadatan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2020 adalah 164 jiwa per Km². Adapun kepadatan penduduk pada tahun 2010 adalah sebesar 154 jiwa per Km². Dalam waktu sepuluh tahun, kepadatan penduduk di Kabupaten Langkat telah bertambah sekitar 10 jiwa dalam tiap satu Km² wilayahnya.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat antara tahun 2010 dan 2020 adalah sebesar 0,61 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk periode sebelumnya (2000-2010) yang berada di angka 0,66 persen, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk melambat 0,05 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan periode 1971 - 1980 yang sebesar 4,28 persen, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Langkat mengalami penurunan sekitar 3,67 persen.

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat perjenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki sebesar 524.481 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 517.294 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,39 persen.



Tabel 5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2020

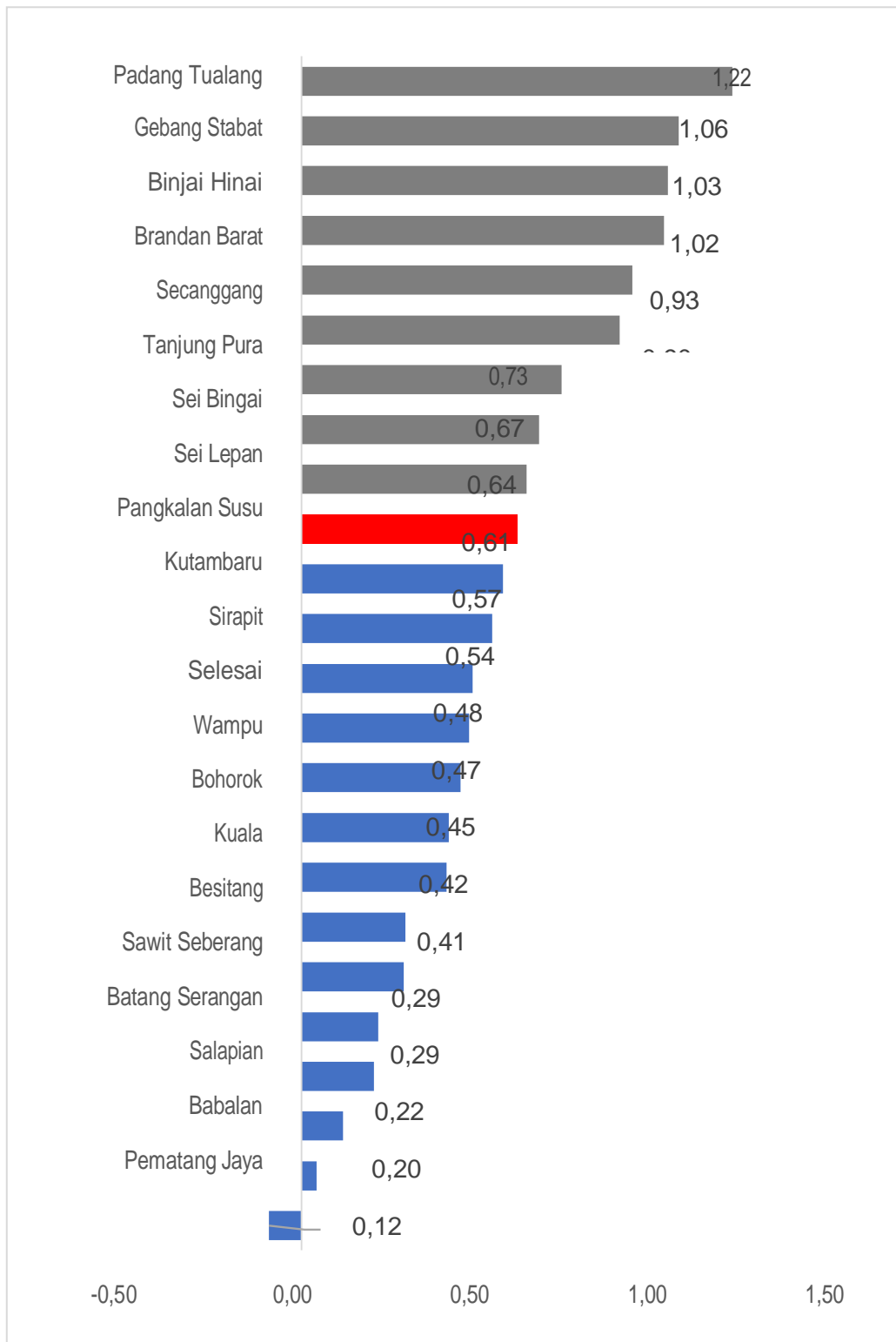
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Bohorok	41.570
Sirapit	16.703
Salapian	26.238
Kutambaru	14.109
Sei Bingai	51.617
Kuala	40.327
Selesai	72.595
Binjai	47.018
Stabat	91.153
Wampu	42.388
Batang Serangan	35.764
Sawit Seberang	25.765
Padang Tualang	52.895
Hinai	52.664
Secanggang	70.482
Tanjung Pura	69.018
Gebang	47.509
Babalan	56.706
Sei Lapan	49.630
Berandan Barat	24.023
Besitang	45.286
Pangkalan Susu	43.873
Pematang Jaya	12.869
Kabupaten Langkat	1.030.202

Sumber Data : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2021



Tabel 6

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2020



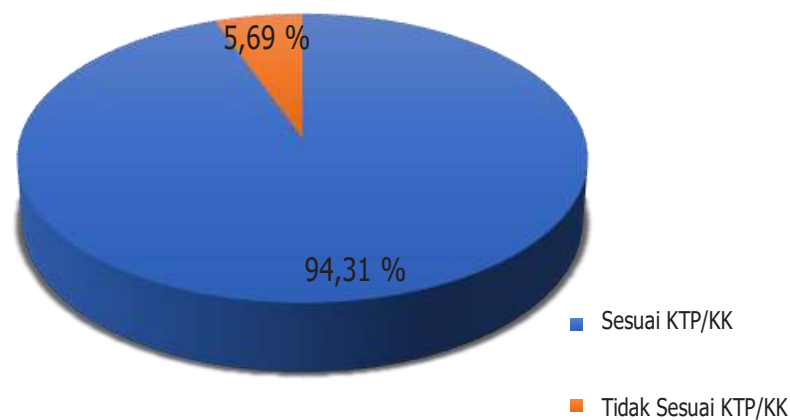
Sumber Data : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2021



Dari 1,03 juta penduduk Kabupaten Langkat, sebesar 94,31 persen atau sekitar 971,55 ribu penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK)*. Sementara sebesar 5,69 persen atau sekitar 58,65 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK (Gambar 4). Jumlah ini merupakan indikasi bahwa tidak banyak penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya sehingga masih tinggal pada alamat yang tercatat pada KK.

Gambar 2

Persentase Penduduk Berdasarkan Kesesuaian Alamat Domisili dan KK Tahun 2020



D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan perombakan struktur organisasi.

Susunan organisasi di Pemerintahan Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi perangkat daerah Kabupaten Langkat dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang perubahan pembentukan organisasi Kabupaten Langkat.



Bentuk organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2014 adalah dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 7
Jumlah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Langkat

NO	SUSUNAN ORGANISASI BERDASAR PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014	NO	SUSUNAN ORGANISASI BERDASAR ERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3	INSPEKTORAT	3	INSPEKTORAT
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
6	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	KANTOR KESBANG POL
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
8	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAH	8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	11	DINAS PENDIDIKAN
12	DINAS KESEHATAN	12	DINAS KESEHATAN
13	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	13	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



14	DINAS PEKERJAAN UMUM	14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		15	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
15	DINAS PERHUBUNGAN	17	DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI		-
18	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN		-
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20	DINAS KETENAGAKERJAAN
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL	21	DINAS KOPERASI
22	DINAS PENDAPATAN	22	BADAN PENDAPATAN DAERAH
23	DINAS PERTANIAN	23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
24	DINAS PETERNAKAN		-
25	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN		-
26	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
28	KANTOR SOSIAL	26	DINAS SOSIAL
29	KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	27	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



30	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	29	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
32	KANTOR PELAYANAN TERPADU	30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA	31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA
34	KECAMATAN BAHOROK	32	KECAMATAN BAHOROK
35	KECAMATAN SALAPIAN	33	KECAMATAN SALAPIAN
36	KECAMATAN KUALA	34	KECAMATAN KUALA
37	KECAMATAN SELESAI	35	KECAMATAN SELESAI
38	KECAMATAN SEI BINGAI	36	KECAMATAN SEI BINGAI
39	KECAMATAN BINJAI	37	KECAMATAN BINJAI
40	KECAMATAN STABAT	38	KECAMATAN STABAT
41	KECAMATAN WAMPU	39	KECAMATAN WAMPU
42	KECAMATAN SECANGGANG	40	KECAMATAN SECANGGANG
43	KECAMATAN HINAI	41	KECAMATAN HINAI
44	KECAMATAN TANJUNG PURA	42	KECAMATAN TANJUNG PURA
45	KECAMATAN GEBANG	43	KECAMATAN GEBANG
46	KECAMATAN BABALAN	44	KECAMATAN BABALAN
47	KECAMATAN BERANDAN BARAT	45	KECAMATAN BERANDAN BARAT
48	KECAMATAN SEI LEPAN	46	KECAMATAN SEI LEPAN
49	KECAMATAN PANGKALAN SUSU	47	KECAMATAN PANGKALAN SUSU
50	KECAMATAN BESITANG	48	KECAMATAN BESITANG
51	KECAMATAN PADANG TUALANG	49	KECAMATAN PADANG TUALANG
52	KECAMATAN SAWIT SEBERANG	50	KECAMATAN SAWIT SEBERANG



53	KECAMATAN BATANG SERANGAN	51	KECAMATAN BATANG SERANGAN
54	KECAMATAN SIRAPIT	52	KECAMATAN SIRAPIT
55	KECAMATAN KUTAMBARU	53	KECAMATAN KUTAMBARU
56	KECAMATAN PEMATANG JAYA	54	KECAMATAN PEMATANG JAYA

Sumber Data : Bagian Organisasi

E. WILAYAH ADMINISTRATIF

Wilayah Administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Wilayah dalam pengertian administrative sering disebut juga daerah. Wilayah Administrasi berupa Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas dan wewenang pemerintahan umum di daerah tersebut.

Berdasarkan kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Langkat mempunyai wilayah administrasi terdiri dari 23 Kecamatan, 37 Kelurahan dan 240 Desa, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Langkat

Kecamatan	Ibu Kota	Banyak		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
Bahorok	Pekan Bahorok	18	1	19
Sirapit	Sidorejo	10	-	10
Salapian	Minta kasih	16	1	17
Kutambaru	Kutambaru	8	-	8
Sei Bingai	Namu Ukur Sltn	15	1	16
Kuala	Pekan Kuala	14	2	16
Selesai	Pekan Selesai	13	1	14
Binjai	Kwala Begumit	6	1	7



Stabat	Stabat Baru	6	6	12
Wampu	Bingai	13	1	14
Batang Serangan	Batang Serangan	7	1	8
Sawit Seberang	Sawit Seberang	6	1	7
Padang Tualang	Tjg. Selamat	11	1	12
Hinai	Kebun Lada	12	1	13
Secanggang	Hinai Kiri	16	1	17
Tanjung Pura	Pekan Tanjung Pura	18	1	19
Gebang	Pekan Gebang	10	1	11
Babalan	Pelawi Utara	4	4	8
Sei Lapan	Alur Dua	9	5	14
Brandan Barat	Tangkahan Durian	5	2	7
Besitang	Pekan Besitang	6	3	9
Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	9	2	11
Pematang Jaya	Limau Mungkur	8	-	8
Kabupaten Langkat		240	37	277

Sumber Data : Dinas PMD dan Bagian Pemerintahan

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi.

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Langkat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Langkat Tahun 2019 dan Tahun 2020, sebagai berikut :



Tabel 9
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2019 - 2020

Jabatan	2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Tertentu	1.816	5.508	7.324	1.681	5.373	7.054
Fungsional Umum/Staf	1.315	850	2.165	1.180	722	1.902
Struktural						
Eselon V						
Eselon IV	399	211	610	318	218	536
Eselon III	142	33	175	140	35	175
Eselon II	31	4	35	26	4	30
Eselon I						
Jumlah/ <i>Total</i>	3.703	6.606	10.309	3.345	6.352	9.697

Sumber Data : BKD Kabupaten Langkat

Tabel 10
Jumlah ASN Daerah Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat Daerah	23	97	59	6	185
2	Sekretariat DPRD	2	19	19	1	41



3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	63	49	2	116
4	Dinas Pendidikan	2.864	2.528	206	13	5.611
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38	130	22		190
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	11	4	1	17
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5	24	24	2	55
8	Dinas Kesehatan	14	1.205	777	3	1.999
9	Dinas Perhubungan	3	23	10	1	37
10	Badan Pendapatan Daerah	2	65	25	1	93
11	Dinas Ketenagakerjaan	7	19			26
12	Dinas Koperasi	5	19	4		28
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	13	5		23
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	30	1		33
15	Bappeda	6	26	2		34
16	Inspektorat Kabupaten	12	29	5		46
17	Satuan Polisi Pamong Praja	2	16	50	4	72
18	Badan Kepegawaian Daerah	5	30	4		39
19	Badan Pengelola Keuangan & Asset Daerah	7	42	5		54
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	13	9		26
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	19	5		26
22	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Perempuan Perlingd. Anak	12	26	6		44
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2	14	1		17
24	Dinas Lingkungan Hidup	8	34	10		52
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	2	18	9		29
26	Dinas Penanaman Modal dan P2T Satu Pintu	2	20	5		27



27	Dinas Sosial	3	10	4		17
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	11	4		16
29	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	1	30	7		38
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2	6	8		16
31	RSU Tanjung Pura	15	106	29	1	151
32	Kecamatan	30	304	159	3	359
33	Kelurahan	-	45	21	2	180
Jumlah						9.697

Sumber Data : BKD Kabupaten Langkat

Tabel 11
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan
Dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	32	2	34
SMP/Sederajat General	53	4	57
SMA/Sederajat General	826	924	1.750
Diploma I,II/Akta I, II	91	251	342
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	156	1.102	1.258
Tingkat Sarjana/Pasca Sarjana/ Doktor/Ph.D	2.138	4.118	6.256
Jumlah/ Total	3.296	6.401	9.697

Sumber Data : BKD Kabupaten Langkat



Tabel 12
Jumlah ASN Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2020

Jabatan/Golongan/Ruang	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. I/A (Juru Muda)	3		3
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	3	1	4
3. I/C (Juru Tingkat I)	9	3	12
4. I/D (Juru Tingkat I)	20	1	21
Golongan I	35	5	40
5. II/A (Pengatur Muda)	72	51	123
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	97	60	157
7. II/C (Pengatur)	240	581	821
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	236	211	447
Golongan II	645	903	1.548
9. III/A (Penata Muda)	341	744	1.085
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	389	757	1.146
11. III/C (Penata)	394	735	1.129
12. III/D (Penata Tingkat I)	520	1.008	1.528
Golongan III	1.644	3.244	4.888
13. IV/A (Pembina)	488	1.121	1.609
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	459	1.117	1.576
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	23	11	34
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	2		2



17. IV/E (Pembina Utama)			
Golongan IV	972	2.249	3.221
Jumlah/Total	3.296	6.401	9.697

Sumber Data : BKD Kabupaten Langkat

G. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Acuan yang mendasari pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; yang bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah :

- (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan



uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Sesuai dengan amanah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Langkat meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Langkat menunjukkan peningkatan yang bervariasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai kurang lebih 10 % per tahun. Peningkatan Pendapatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan realisasi DAK dan dana bagi hasil pajak dari Provinsi.

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Meskipun kontribusi dana perimbangan ini cenderung menurun, namun masih terlalu tinggi dibandingkan kontribusi PAD, dengan demikian belum menunjukkan kemandirian daerah.

Secara umum besarnya realisasi Dana Perimbangan cenderung meningkat setiap tahun. Pendapatan dari DAK dan DBH Pajak/bukan pajak fluktuatif cenderung meningkat. Khusus untuk DAK pendapatan ini besaran penerimaannya tergantung dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan



sesuai prioritas nasional, sehingga dapat dipahami bila pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Langkat terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya dan Dana Desa. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Langkat rata-rata mencapai 18,67%. Proporsi ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Sementara itu bagi hasil pajak daerah dari provinsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan sebuah kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

Belanja daerah berkaitan dengan pendapatan daerah yang dapat diserap oleh suatu daerah. Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh



penyelenggara pemerintahan.

Komponen Belanja Daerah ialah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya. Dan Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pada Tahun 2020, **Realisasi Pendapatan** Kabupaten Langkat mencapai Rp. 2.122.684.872.331,88, atau 97,34 % dari Target Anggaran sebesar Rp. 2.180.786.190.790,00. Sementara untuk Realisasi Belanja Rp. 1.847.044.228.237,75 atau 87,84 % dari target anggaran sebesar Rp. 2.102.793.970.440,36. Pada tahun 2020 proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 65,45% sedangkan proporsi realisasi Belanja Langsung mencapai 34,55%.

Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Pada tahun 2020 proporsi realisasi Total Belanja Pegawai terhadap Total Belanja mencapai 72,66%. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah imbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan, serta dengan tingginya proporsi tersebut berakibat mengurangi besaran belanja langsung secara signifikan.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi keuangan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran. Ditinjau berdasarkan komponennya, pembiayaan daerah meliputi :



1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Realisasi pembiayaan Kabupaten Langkat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemudian menurun di tahun 2017. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan terbesar ialah berasal dari penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Sebelumnya. Peningkatan penggunaan SiLPA secara signifikan merupakan akibat dari alokasi anggaran pada program/kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan dan/atau alokasi anggaran yang tidak diserap, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara optimal. Sementara dari pelaksanaan pembangunan selama lima tahun terakhir, Perusahaan Daerah belum mampu secara signifikan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Berikut dibawah ini Tabel LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT, Tahun 2017 – 2020 sebagai berikut :



Tabel 13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
PENDAPATAN - LRA	2.264.130.572.078,00	2.226.626.152.513,45	98,34	2.311.283.153.445,09
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	148.932.567.030,00	136.680.578.541,45	91,77	139.717.647.855,09
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	58.260.000.000,00	59.765.187.014,00	102,58	56.895.356.836,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	24.414.179.350,00	20.734.682.392,00	84,93	20.768.318.452,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.200.000.000,00	7.421.389.631,00	103,07	6.953.913.846,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	59.058.387.680,00	48.759.319.504,45	82,56	55.100.058.721,09
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.830.358.247.991,00	1.806.703.118.972,00	98,71	1.871.062.152.590,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.746.118.831.163,00	1.722.928.314.875,00	98,67	1.774.515.682.680,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	147.453.827.163,00	144.166.716.603,00	97,77	180.799.143.837,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	4.344.434.000,00	5.359.175.531,00	123,36	2.558.573.259,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.179.392.864.000,00	1.179.392.864.000,00	100,00	1.179.392.864.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	414.927.706.000,00	394.009.558.741,00	94,96	411.765.101.584,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	75.039.416.828,00	75.238.033.167,00	100,26	96.546.469.910,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	73.892.744.357,00	74.091.360.696,00	100,27	89.866.424.463,00
Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	1.146.672.471,00	1.146.672.471,00	100,00	6.680.045.447,00
Bantuan Keuangan - LRA	9.200.000.000,00	8.536.770.930,00	92,79	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	9.200.000.000,00	8.536.770.930,00	92,79	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	284.839.757.057,00	283.242.455.000,00	99,44	300.503.353.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	105.652.502.057,00	104.055.200.000,00	98,49	107.639.530.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	179.187.255.000,00	179.187.255.000,00	100,00	192.863.823.000,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat



BELANJA	2.073.309.076.195,92	1.906.579.114.157,00	91,96	1.986.917.792.023,16
BELANJA OPERASI	1.647.108.293.402,24	1.525.143.275.228,00	92,60	1.459.434.222.676,00
Belanja Pegawai	1.121.000.608.774,74	1.059.328.633.268,00	94,50	1.025.022.327.919,00
Belanja Barang dan Jasa	443.176.582.727,50	393.820.452.598,00	88,86	398.272.079.657,00
Belanja Hibah	72.960.101.900,00	64.304.439.362,00	88,14	29.481.615.100,00
Belanja Bantuan Sosial	9.971.000.000,00	7.689.750.000,00	77,12	6.658.200.000,00
BELANJA MODAL	424.561.782.793,68	380.576.043.929,00	89,64	527.164.701.722,16
Belanja Modal Tanah	2.470.000.000,00	1.701.480.821,00	68,89	1.194.597.146,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.416.467.858,00	35.929.410.187,00	79,11	36.811.605.641,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.789.001.404,00	46.726.064.666,00	97,78	48.063.788.713,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.164.372.556,68	258.455.783.070,00	89,38	403.754.115.283,16
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.838.940.975,00	2.762.215.500,00	97,30	2.813.728.525,00
Belanja Modal Dana BOS	36.883.000.000,00	35.001.089.685,00	94,90	34.526.866.414,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.639.000.000,00	859.795.000,00	52,46	318.867.625,00
Belanja Tak Terduga	1.639.000.000,00	859.795.000,00	52,46	318.867.625,00
TRANSFER	317.806.467.867,00	317.531.000.267,00	99,91	333.301.062.832,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.795.917.935,00	3.795.917.935,00	100,00	3.505.085.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.795.917.935,00	3.795.917.935,00	100,00	3.505.085.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	314.010.549.932,00	313.735.082.332,00	99,91	329.795.977.832,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	313.190.549.300,00	312.915.081.700,00	99,91	328.975.977.200,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	820.000.632,00	820.000.632,00	100,00	820.000.632,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(126.984.971.984,92)	2.516.038.089,45	(1,98)	(8.935.701.410,07)

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat



PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.359.228.520,92	130.468.532.865,92	100,08	142.794.929.930,99
Penggunaan SiLPA	130.359.228.520,92	130.468.532.865,92	100,08	142.794.929.930,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.374.256.536,00	3.374.256.536,00	100,00	3.500.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.374.256.536,00	1.374.256.536,00	100,00	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	126.984.971.984,92	127.094.276.329,92	100,09	139.294.929.930,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	129.610.314.419,37	0,00	130.359.228.520,92

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat



Tabel 14
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
PENDAPATAN - LRA	2.351.829.208.710,00	2.361.512.739.444,63	100,41	2.226.626.152.513,45
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	156.520.657.861,00	167.523.076.879,63	107,03	136.680.578.541,45
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	67.642.000.000,00	76.128.182.957,00	112,55	59.765.187.014,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	25.620.779.350,00	29.149.528.528,00	113,77	20.734.682.392,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.420.000.000,00	6.307.629.896,00	85,01	7.421.389.631,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	55.837.878.511,00	55.937.735.498,63	100,18	48.759.319.504,45
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.867.800.165.849,00	1.868.438.425.165,00	100,03	1.806.703.118.972,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.783.883.721.720,00	1.732.852.882.496,00	97,14	1.722.928.314.875,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	162.849.974.000,00	141.671.175.686,00	86,99	144.166.716.603,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	10.502.130.000,00	8.280.320.785,00	78,84	5.359.175.531,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.229.427.123.000,00	1.229.427.123.000,00	100,00	1.179.392.864.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	381.104.494.720,00	353.474.263.025,00	92,75	394.009.558.741,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	83.916.444.129,00	135.585.542.669,00	161,57	75.238.033.167,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	77.959.544.415,00	122.648.076.020,00	157,32	74.091.360.696,00
Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	5.956.899.714,00	12.937.466.649,00	217,18	1.146.672.471,00
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	8.536.770.930,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	8.536.770.930,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	327.508.385.000,00	325.551.237.400,00	99,40	283.242.455.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	122.062.117.000,00	120.380.437.000,00	98,62	104.055.200.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	205.446.268.000,00	205.170.800.400,00	99,87	179.187.255.000,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat



BELANJA	2.127.606.195.704,37	1.881.201.028.726,64	88,42	1.906.579.114.157,00
BELANJA OPERASI	1.738.731.356.589,20	1.535.165.052.449,55	88,29	1.525.143.275.228,00
Belanja Pegawai	1.229.269.595.718,00	1.079.112.528.479,57	87,78	1.059.328.633.268,00
Belanja Barang dan Jasa	477.708.766.671,20	427.655.521.969,98	89,52	393.820.452.598,00
Belanja Hibah	19.144.150.000,00	17.594.952.000,00	91,91	64.304.439.362,00
Belanja Bantuan Sosial	12.608.844.200,00	10.802.050.000,00	85,67	7.689.750.000,00
BELANJA MODAL	387.964.679.227,00	346.035.976.277,09	89,19	380.576.043.929,00
Belanja Modal Tanah	1.033.863.525,00	908.602.638,00	87,88	1.701.480.821,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.579.006.770,00	38.790.667.663,12	79,85	35.929.410.187,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.188.922.538,00	50.708.587.293,60	93,58	46.726.064.666,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.227.901.959,00	213.449.718.791,37	93,52	258.455.783.070,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.929.738.770,00	1.909.612.525,00	98,96	2.762.215.500,00
Belanja Modal Dana BOS	54.005.245.665,00	40.268.787.366,00	74,56	35.001.089.685,00
BELANJA TAK TERDUGA	910.159.888,17	0,00	0,00	859.795.000,00
Belanja Tak Terduga	910.159.888,17	0,00	0,00	859.795.000,00
TRANSFER	343.751.446.731,00	342.860.770.941,00	99,74	317.531.000.267,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.088.917.935,00	4.088.917.935,00	100,00	3.795.917.935,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.088.917.935,00	4.088.917.935,00	100,00	3.795.917.935,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	339.662.528.796,00	338.771.853.006,00	99,74	313.735.082.332,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	338.842.528.164,00	337.954.554.744,00	99,74	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	312.915.081.700,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	820.000.632,00	817.298.262,00	99,67	820.000.632,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(119.528.433.725,37)	137.450.939.776,99	(114,99)	2.516.038.089,45

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat



PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	100,00	130.468.532.865,92
Penggunaan SiLPA	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	100,00	130.468.532.865,92
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.122.330.000,00	2.122.330.000,00	100,00	3.374.256.536,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	122.330.000,00	122.330.000,00	100,00	1.374.256.536,00
PEMBIAYAAN NETTO	127.487.984.419,37	127.487.984.419,37	100,00	127.094.276.329,92
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.959.550.694,00	264.938.924.196,36	3.328,57	129.610.314.419,37

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat



Tabel 15

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
PENDAPATAN - LRA	2.180.786.190.792,00	2.122.684.872.331,88	97,34	2.361.512.739.444,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	167.120.835.030,00	168.843.723.199,88	101,03	167.523.076.879,63
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	70.986.254.380,00	71.908.157.019,00	101,30	76.128.182.957,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	29.245.779.350,00	26.019.401.720,00	88,97	29.149.528.528,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9.950.000.000,00	8.730.147.444,00	87,74	6.307.629.896,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	56.938.801.300,00	62.186.017.016,88	109,22	55.937.735.498,63
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.682.438.370.762,00	1.623.324.864.132,00	96,49	1.868.438.425.165,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.574.057.794.005,00	1.537.931.438.606,00	97,70	1.732.852.882.496,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	153.865.651.633,00	113.126.902.259,00	73,52	141.671.175.686,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.359.284.082,00	6.140.119.328,00	114,57	8.280.320.785,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.099.658.531.000,00	1.099.658.531.000,00	100,00	1.229.427.123.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	315.174.327.290,00	319.005.886.019,00	101,22	353.474.263.025,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	12.506.607.000,00	12.506.607.000,00	100,00	0,00
Dana Penyesuaian - LRA	12.506.607.000,00	12.506.607.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	95.873.969.757,00	72.886.818.526,00	76,02	135.585.542.669,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	88.152.062.721,00	69.224.821.821,00	78,53	122.648.076.020,00
Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	7.721.907.036,00	3.661.996.705,00	47,42	12.937.466.649,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	331.226.985.000,00	330.516.285.000,00	99,79	325.551.237.400,00
Pendapatan Hibah - LRA	122.607.400.000,00	121.896.700.000,00	99,42	120.380.437.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	208.619.585.000,00	208.619.585.000,00	100,00	205.170.800.400,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat



BELANJA	2.102.793.970.440,36	1.847.044.228.237,75	87,84	1.881.201.028.726,64
BELANJA OPERASI	1.719.191.094.072,50	1.515.972.902.133,49	88,18	1.535.165.052.449,55
Belanja Pegawai	1.208.815.465.719,50	1.066.527.430.224,00	88,23	1.079.112.528.479,57
Belanja Barang dan Jasa	479.024.290.349,00	421.460.571.909,49	87,98	427.655.521.969,98
Belanja Hibah	19.413.300.000,00	17.889.600.000,00	92,15	17.594.952.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.938.038.004,00	10.095.300.000,00	84,56	10.802.050.000,00
BELANJA MODAL	319.553.738.779,00	295.574.159.088,86	92,50	346.035.976.277,09
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	908.602.638,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.688.816.728,00	40.981.779.052,00	77,78	38.790.667.663,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.678.247.584,34	36.050.706.905,07	98,29	50.708.587.293,60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.268.396.458,66	169.433.539.672,79	94,51	213.449.718.791,37

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat

BELANJA	2.438.362.154.104,36	2.182.503.781.901,75	89,51
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.601.937.305.326,36	1.428.379.658.981,40	89,17
Belanja Pegawai	1.170.968.646.069,50	1.029.329.408.302,00	87,90
Belanja Hibah	20.284.591.322,00	18.760.891.322,00	92,49
Belanja Bantuan Sosial	11.938.038.004,00	10.095.300.000,00	84,56
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.134.270.142,00	4.134.270.142,00	100
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	330.562.622.200,00	330.562.622.200,00	100
Belanja Tidak Terduga	64.049.137.588,86	35.497.167.015,40	55,42
BELANJA LANGSUNG	836.424.848.778,00	754.124.122.920,35	90,16
Belanja Pegawai	139.128.563.049,00	130.457.519.004,00	93,77



Belanja Barang dan Jasa	377.742.546.950,00	328.107.987.827,49	86,86
- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	377.742.546.950,00	328.107.987.827,49	86,86
Belanja Modal	319.553.738.779,00	295.558.616.088,86	92,49

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat

PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	264.938.924.196,36	264.938.924.196,36	100,00	129.610.314.419,37
Penggunaan SiLPA	264.938.924.196,36	264.938.924.196,36	100,00	129.610.314.419,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.362.960.884,00	7.362.960.884,00	100,00	2.122.330.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.362.960.884,00	7.362.960.884,00	100,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	122.330.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	257.575.963.312,36	257.575.963.312,36	100,00	127.487.984.419,37
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	197.648.423.742,49	0,00	264.938.924.196,36

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Langkat





II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

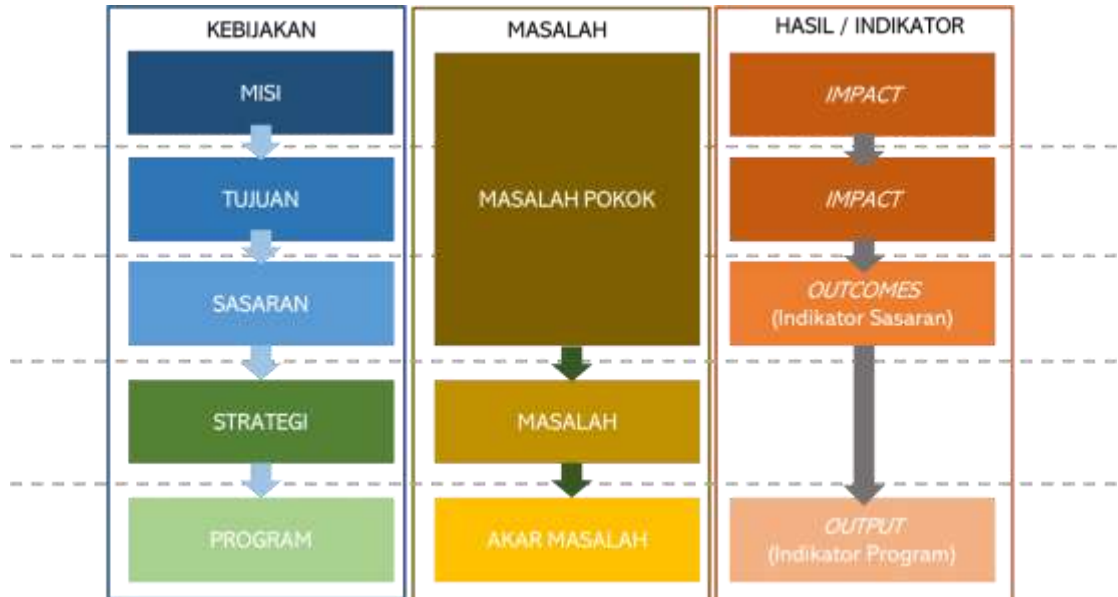
a. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan target yang direncanakan atau kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena adanya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Dari permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja maupun kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan pada bagian sebelumnya, kemudian permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pemetaan tersebut dilakukan dengan penyesuaian level masalah dengan level kebijakan dalam RPJMD dan dengan menggunakan teknik *logical framework analysis*. Dengan penstrukturan tersebut maka didapatkan struktur masalah dalam level *impact*, *outcomes*, dan *output* seperti yang digambarkan berikut :

Gambar 3
Penstrukturan Permasalahan dalam RPJMD Kab. Langkat



Dari hasil penstrukturan masalah yang dilakukan, didapatkan 6 (enam) masalah pokok dalam level misi dengan penjelasan pada tabel dibawah ini :

- a). Belum mandirinya desa dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 16
Belum Mandirinya Desa dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Masalah Pokok			Masalah	Akar Masalah	Urusan Pemerintahan Daerah Terkait
Impact (Misi)	Impact (Tujuan)	Outcomes (Sasaran)			
Belum mandirinya desa dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk	Belum optimalnya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa	Belum signifikannya peningkatan status desa menjadi berkembang	Belum Optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Belum memadainya sarana dan parasana perkantoran pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



meningkatkan kesejahteraan	untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial	dan mandiri	Belum Optimalnya peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi	Belum optimalnya pengembangan infrastruktur skala desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Rendahnya tingkat kerjasama antar desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Belum optimalnya peran BUMDES dan lembaga pemberdayaan di level desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya penanganan PMKS	Sosial
				Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Sosial
			Belum terkendalinya pertumbuhan penduduk yang berkontribusi terhadap permasalahan sosial	Belum optimalnya kebijakan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Belum optimalnya pemberdayaan perempuan	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus-kasus terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Minimnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Rendahnya partisipasi pemuda dalam aktivitas kepemudaan dan olahraga	Rendahnya tingkat pertumbuhan kegiatan kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
				Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi produktif	Kepemudaan dan Olahraga
				Rendahnya prestasi pemuda dalam olahraga	Kepemudaan dan Olahraga
				Rendahnya ketersediaan fasilitas olahraga	Kepemudaan dan Olahraga
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal	Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya	Kebudayaan
				Belum optimalnya apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	Kebudayaan



		budaya lokal	Belum optimalnya pengembangan budaya lokal melalui pariwisata	Rendahnya jumlah event kebudayaan	Kebudayaan
				Rendahnya jumlah daya tarik wisata budaya	Pariwisata
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan	Belum optimalnya pemanfaatan wadah-wadah aktualisasi keagamaan	Belum intensifnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Belum intensifnya penyelenggaraan festival dan event keagamaan di masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; Kebudayaan
				Belum optimalnya peran organisasi kerukunan umat beragama	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan	Belum optimalnya peran masyarakat dalam keamanan lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Belum intensifnya kegiatan gotong royong di level masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah	Rendahnya peran masyarakat dalam pengawasan pelanggaran perda	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Belum optimalnya pengawasan dan penertiban pelanggaran perda	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Belum intensifnya peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Belum optimalnya pemanfaatan PKK	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Rendahnya tingkat pelaksanaan kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Penunjang Urusan : Kewilayahan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024



b). Rendahnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pelayanan

Tabel 17

Rendahnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pelayanan

Masalah Pokok			Masalah	Akar Masalah	Urusan Pemerintahan Daerah Terkait
Impact (Misi)	Impact (Tujuan)	Outcomes (Sasaran)			
Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan dasar	Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi penduduk	Rendahnya partisipasi penduduk dalam pendidikan anak usia dini	Pendidikan
				Masih rendahnya partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar	Pendidikan
				Masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan sekolah	Pendidikan
			Masih rendahnya mutu pendidikan dasar	Belum optimalnya kualitas tenaga kependidikan	Pendidikan
				Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Pendidikan
			Belum optimalnya literasi penduduk	Rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan	Perpustakaan
				Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan	Perpustakaan
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Belum optimalnya penanganan kondisi gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat, serta keselamatan melahirkan.	Masih terdapatnya kasus kematian ibu dan anak	Kesehatan
				Belum optimalnya perbaikan kondisi gizi masyarakat	Kesehatan
				Belum optimalnya pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat	Kesehatan
			Belum optimalnya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan	Belum optimalnya jangkauan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Kesehatan
			Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Rendahnya kualitas fasilitas kesehatan	Kesehatan
				Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan kesehatan	Kesehatan
				Belum terdistribusinya jumlah fasilitas kesehatan secara merata	Kesehatan



			Belum optimalnya peningkatan akses masyarakat pada layanan KB	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Masih tingginya angka rata-rata jumlah anak per keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024

c). Belum Signifikannya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 18

Belum Signifikannya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Masalah Pokok			Masalah	Akar Masalah	Urusan Pemerin- tahan Daerah Terkait
Impact (Misi)	Impact (Tujuan)	Outcomes (Sasaran)			
Belum signifikan-nya peningkatan pertumbuhan ekonomi	Belum signifikan-nya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan unggulan daerah lainnya dalam meningkatkan pendapatan dan	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	Belum berkembangnya potensi pariwisata daerah	Belum tertatanya destinasi wisata	Pariwisata
				Minimnya sarana dan prasarana di hampir semua objek wisata	Pariwisata
				Kurangnya aksesibilitas menuju objek wisata	Pariwisata
				Belum adanya regulasi terkait pariwisata	Pariwisata
	penurunan tingkat pengangguran		Belum optimalnya promosi wisata	Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan	Pariwisata
			Belum mendukungnya industri pariwisata	Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata	Pariwisata
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Belum optimalnya peran kelompok pengelola dalam pariwisata	Pariwisata
				Rendahnya keahlian masyarakat dalam jasa pariwisata	Pariwisata
		Belum optimalnya peran UMKM, Koperasi, dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	Belum optimalnya pengembangan UMKM	Rendahnya tingkat kebaruan produk UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Rendahnya tingkat pemasaran produk UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan



					Menengah
				Belum optimalnya pembinaan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Belum optimalnya peran koperasi	Rendahnya cakupan koperasi aktif	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Rendahnya daya saing IKM	Rendahnya pertumbuhan jumlah IKM	Perindustrian
				Rendahnya tingkat kebaruan produk IKM	Perindustrian
			Belum optimalnya pemasaran produk UMKM dan IKM	Rendahnya pengembangan sentra IKM	Perindustrian
				Belum optimalnya pembinaan IKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Belum optimalnya pemanfaatan pariwisata untuk pemasaran IKM	Perindustrian
			Belum optimalnya pengembangan sistem perdagangan dalam mendukung ekonomi kreatif	Kurangnya pengembangan pasar tradisional/rakyat	Perdagangan
				Belum optimalnya pembinaan pedagang	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Belum optimalnya peningkatan produksi	Belum optimalnya kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	Pangan
		pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan		daerah	
				Belum optimalnya peningkatan konsumsi ikan	Kelautan dan Perikanan
			Belum optimalnya upaya penanganan kerawanan pangan	Belum tersedianya sistem informasi dan database pengelolaan pangan	Pangan
				Belum optimalnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Pangan
			Rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Belum optimalnya peningkatan produksi komoditas pertanian	Pertanian
				Belum optimalnya pemanfaatan TTG dalam pertanian	Pertanian
			Belum optimalnya kinerja infrastruktur pengairan	Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rendahnya produktivitas peternakan	Rendahnya produksi hasil peternakan	Pertanian



			Masih terdapatnya penyakit ternak	Pertanian
			Belum optimalnya TTG dalam peternakan	Pertanian
		Rendahnya daya saing komoditas perkebunan	Belum optimalnya peningkatan komoditas perkebunan	Pertanian
		Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan	Kurangnya kapasitas kelembagaan, SDM Petani dan pelaku usaha agribisnis	Pertanian
		Rendahnya daya saing perikanan	Belum optimalnya peningkatan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan
			Belum optimalnya peningkatan perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
			Belum optimalnya pemberdayaan nelayan	Kelautan dan Perikanan
		Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi lokal	Rendahnya kompetensi kewirausahaan masyarakat	Tenaga Kerja
			Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal	Tenaga Kerja
			Rendahnya kompetensi tenaga kerja	Tenaga Kerja
		Belum optimalnya pertumbuhan investasi daerah	Belum optimalnya penciptaan iklim usaha dan investasi	Penanaman Modal
			Belum optimalnya regulasi investasi dalam mendorong investasi	Penanaman Modal
			Belum optimalnya promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal
		Rendahnya kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya realisasi PAD	Tingginya piutang pajak dan redistribusi
				Penunjang Urusan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024

d) Rendahnya Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.



Tabel 19
Rendahnya Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang dalam Penciptaan
Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Masalah Pokok			Masalah	Akar Masalah	Urusan Pemerintahan Daerah Terkait
Impact (Misi)	Impact (Tujuan)	Outcomes (Sasaran)			
Rendahnya kinerja infrastruktur dan tata ruang dalam penciptaan lingkungan hidup berkelanjutan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup untuk penurunan kesenjangan wilayah	Rendahnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	Belum optimalnya penyediaan jalan kabupaten	Belum optimalnya penyediaan lahan untuk pengembangan jalan	Pertanahan
				Belum optimalnya pengembangan jalan Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rendahnya kualitas jaringan jalan	Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu lalu lintas/marka jalan	Perhubungan
				Masih tingginya proporsi jalan dalam kondisi buruk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rendahnya pelayanan angkutan umum	Belum optimalnya peningkatan arus penumpang angkutan umum	Perhubungan
				Belum tercakupnya seluruh wilayah oleh angkutan umum	Perhubungan
		Rendahnya kinerja infrastruktur permukiman	Masih terdapatnya kawasan kumuh	Belum optimalnya penataan kawasan kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Belum optimalnya penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rendahnya cakupan layanan air bersih	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rendahnya cakupan layanan sanitasi	Belum memadainya jaringan air bersih skala lingkungan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rendahnya cakupan layanan sanitasi di perkotaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Belum memadainya jaringan sanitasi skala lingkungan	Belum memadainya jaringan sanitasi skala lingkungan	Perumahan dan Kawasan Permukiman



				Rendahnya cakupan layanan persampahan di perkotaan	Lingkungan Hidup
				Belum memadainya sistem pengelolaan sampah komunal skala lingkungan	Lingkungan Hidup
				Belum ditetapkan rencana tata ruang detil	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Belum optimalnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
				Belum optimalnya upaya penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Belum optimalnya cakupan wilayah penanganan bencana kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Belum optimalnya kinerja drainase dan saluran pembuangan air	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024

- e) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Prima.

Tabel 20

Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Prima

Masalah Pokok			Masalah	Akar Masalah	Urusan Pemerintahan Daerah Terkait
Impact (Misi)	Impact (Tujuan)	Outcomes (Sasaran)			
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan pelayanan publik yang prima	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan	Belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Belum optimalnya peningkatan ketertiban penyelesaian laporan keuangan	Penunjang Urusan : Pengelolaan Keuangan Daerah
				Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Penunjang Urusan : Pengelolaan Keuangan Daerah



			Rendahnya tingkat profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Belum optimalnya manajemen SDM pemerintah daerah	Penunjang Urusan : Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
				Belum optimalnya kinerja ASN	Penunjang Urusan : Pengawasan
				Masih terdapatnya pelanggaran kedisiplinan pegawai	Penunjang Urusan : Pengawasan
			Belum optimalnya pemanfaatan kelitbangan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Belum tersedianya kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Penunjang Urusan : Penelitian Pembangunan
				Rendahnya tingkat implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan	Penunjang Urusan : Penelitian Pembangunan
				Rendahnya tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penunjang Urusan : Penelitian Pembangunan
			Belum optimalnya fungsi pengawasan keuangan dan kinerja	Belum optimalnya tindak lanjut hasil temuan pengawas	Penunjang Urusan : Pengawasan
				Belum optimalnya kompetensi APIP	Penunjang Urusan : Pengawasan
				Rendahnya tingkat konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penunjang Urusan : Pengawasan
	Belum signifikannya peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	Belum optimalnya tata kelola SPBE di level pemerintah daerah	Belum optimalnya penyediaan jaringan internet di kantor pemerintahan dan kecamatan		Komunikasi dan Informatika
				Belum terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan dan layanan publik	Komunikasi dan Informatika
			Belum optimalnya manajemen pelaporan masyarakat berbasis TIK		Penunjang Urusan : Kesekretariatan Daerah
			Belum optimalnya penjangkauan aspirasi masyarakat berbasis TIK		Penunjang Urusan : Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan Dewan
			Belum optimalnya pelayanan KTP		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



				Belum optimalnya pelayanan penerbitan akta lahir	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Belum optimalnya pelayanan penerbitan akta pernikahan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan perizinan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Rendahnya penerapan arsip baku di level pemerintah daerah	Kearsipan
				Belum terintegrasinya data statistik daerah	Statistik dan Persandian
				Belum tersedianya pusat data terintegrasi	Statistik dan Persandian

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024

b. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

a). Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Kabupaten Langkat berkaitan dengan rendahnya nilai IPM pada dimensi pendidikan. Rendahnya nilai IPM pada dimensi pendidikan disebabkan oleh rata-rata lama sekolah (RLS) yang pada tahun 2018 berada pada angka 8,52 tahun. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah terkait dengan kurangnya partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar, APM SMP/MTs di Kabupaten Langkat mencapai 78,61. Selain itu, masih terdapat anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Langkat juga belum optimal yang disebabkan oleh rendahnya



kualitas dan kuantitas tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

Partisipasi penduduk dalam dunia pendidikan juga diperburuk dengan tingkat literasi penduduk dan pengetahuan kebudayaan lokal. Masih diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui peningkatan budaya baca dan pelestarian kebudayaan. Tingkat kunjungan perpustakaan di Kabupaten Langkat masih rendah. Rendahnya budaya baca masyarakat juga diakibatkan oleh sarana dan prasarana perpustakaan kurang memadai. Pengetahuan masyarakat terhadap budaya lokal di Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan pelestarian budaya yang belum optimal.

Isu partisipasi sekolah rendah akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM masyarakat Kab. Langkat dan juga berhubungan dengan potensi permasalahan lainnya. Pada saat ini Kabupaten Langkat memiliki keunggulan karena memiliki potensi pariwisata yang kemudian didukung dengan penetapan KSPN Tangkahan dan sekitarnya serta KPPN Bukit Lawang. Potensi ini akan memberikan dampak ekonomi yang perlu dimanfaatkan dengan penyiapan SDM penduduk. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan penduduk menyebabkan kualitas tenaga kerja yang rendah dan minimnya partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, kriminalitas, dan penggunaan NAPZA. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan rendahnya partisipasi penduduk usia remaja (pemuda) dalam berwirausaha dan berprestasi dalam kepemudaan maupun bidang olahraga.

b). Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2018 AHH Kab. Langkat mencapai angka 68,22 dan berada di bawah AHH Provinsi Sumatera Utara. Persoalan ini juga terkait dengan nilai AKI dan AKB masih tinggi, prevalensi gizi buruk, dan masih adanya ancaman penyakit. Dari segi pola hidup masyarakat, masih terdapat persoalan perilaku sebagian masyarakat untuk



hidup bersih dan sehat masih kurang karena layanan sanitasi dan air bersih yang belum memalalai. Kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Langkat juga berhubungan dengan belum memadainya sarana prasarana kesehatan dan juga tenaga medis. Pelayanan kesehatan juga belum sepenuhnya mencakupi penduduk miskin. Selain persoalan taraf kesehatan penduduk, masih terdapat persoalan terkait pertumbuhan penduduk yang belum optimal pengendaliannya. Belum seluruh masyarakat mengikuti program KB.

- c). Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengentasan Permasalahan Sosial, Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban, dan Pelestarian Budaya

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan di Kabupaten Langkat tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga menjadi penyebab utama permasalahan sosial di Kabupaten Langkat. Permasalahan sosial di Kabupaten Langkat masih cukup tinggi yang ditunjukkan dengan jumlah PMKS pada tahun 2018 mencapai angka 193.050. Kontributor tertinggi penyebab tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Langkat ialah jumlah fakir miskin yang meningkat sebesar 500 ribu jiwa. Peningkatan lainnya ialah pada korban bencana alam dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Tingginya angka PMKS juga diakibatkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS. Selain itu potensi dan sumber kesejahteraan sosial juga belum dimanfaatkan untuk menanggulangi permasalahan sosial. Selain itu, kegiatan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial masih terbatas.

Permasalahan sosial lainnya di Kabupaten Langkat ialah penyalahgunaan NAPZA yang sangat berpotensi pada peningkatan kriminalitas di lingkungan. Permasalahan kemiskinan dan sosial di Kabupaten Langkat juga menciptakan adanya konflik sosial dan rendahnya tingkat keamanan. Belum intensifnya kegiatan keagamaan dan kebudayaan di Kabupaten Langkat dapat memicu gangguan ketentraman dan ketertiban. Persoalan ini muncul akibat belum intensifnya pemberdayaan terhadap forum komunitas nelayan, forum



komunitas dan kerukunan umat beragama, dan komunitas lokal lainnya. Pengentasan permasalahan sosial di Kabupaten Langkat memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dalam skala lingkungan.

d). Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kemiskinan di Kabupaten Langkat tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat namun juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan sarana prasarana dasar terutama di level desa. Pemerintahan desa dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 menciptakan kewenangan pemerintah desa yang luas untuk melakukan pembangunan desa di bidang fisik, ekonomi, dan sosial. Namun, di Kabupaten Langkat pemberdayaan desa belum optimal dilakukan terutama untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Di tahun 2018 Kabupaten Langkat masih memiliki desa tertinggal dan masih sedikit yang merupakan desa mandiri. Belum mandirinya desa diakibatkan oleh kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan pengelolaan SDA dan lingkungan serta pembangunan fisik dan sosial di tingkat desa.

Persoalan pengelolaan SDA di Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Karakteristik fisik wilayah Kabupaten Langkat yang terletak di kawasan pesisir dan juga merupakan memiliki kawasan konservasi menyebabkan pembangunan di wilayah ini tidak hanya harus berkelanjutan secara ekonomi, namun juga secara sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Langkat juga terjadi penurunan tingkat kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan pada kawasan konservasi. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan belum optimal akibat belum memadainya infrastruktur dan fasilitas untuk penanganan penurunan kualitas lingkungan hidup serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.



Kabupaten Langkat juga memiliki tingkat resiko bencana banjir yang cukup tinggi karena terletak di wilayah sungai yang cukup besar. Tingginya tingkat resiko bencana banjir ini juga didukung dengan belum memadainya jaringan drainase sekunder dan tersier dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai. Kerentanan wilayah di Kabupaten Langkat juga cukup tinggi karena belum tertatanya kawasan permukiman dan pertanian di lokasi rawan bencana serta belum optimalnya kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana belum tertatanya kawasan pertanian di lokasi rawan bencana.

e). Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Berbasis SDA Terutama Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Ekonomi Wilayah

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Langkat mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh kecenderungan penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun dari tahun 2014 ke tahun 2018. Pada tahun 2018 LPE Kab. Langkat mencapai angka 5.02% dan berada di bawah LPE Sumatera Utara. Kondisi ini tidak sejalan dengan potensi ekonomi Kabupaten Langkat yang memiliki potensi SDA yang tinggi dan ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Potensi ekonomi wilayah terutama dalam sektor pariwisata dan pertanian masih belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB belum signifikan.

Kondisi ekonomi makro tersebut sangat bertolakbelakang dengan potensi SDA yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat. Meskipun mengalami peningkatan, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Langkat belum berkembang secara signifikan dan mengalami beberapa persoalan. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Langkat mengalami penurunan produktivitas yang diakibatkan oleh penurunan produksi komoditas dan alih fungsi lahan pertanian produktif. Persoalan lainnya ialah diakibatkan kurangnya daya saing komoditas perikanan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat merupakan wilayah pesisir yang



memiliki posisi strategis dengan menghadap Selat Malaka. Potensi ini belum dimanfaatkan dan menciptakan daya saing ekonomi maupun kesejahteraan untuk nelayan. Hal ini diakibatkan oleh belum optimalnya infrastruktur pendukung perikanan dan rendahnya penciptaan nilai tambah komoditas perikanan.

Penurunan produktivitas pertanian dan perikanan di Kabupaten juga berhubungan dengan isu ketahanan pangan. Di Kabupaten Langkat, penyerapan pangan masih belum optimal dan tingkat konsumsi pangan masih cukup rendah. Penyerapan pangan berhubungan dengan persoalan distribusi pangan antar wilayah tidak merata, belum optimalnya pencadangan pangan, dan belum memadainya sarana distribusi pangan. Hal yang sama juga terjadi pada subsektor peternakan yang mengalami penurunan produktivitas karena kualitas produksi komoditas yang menurun. Penurunan kualitas produksi komoditas peternakan terjadi karena belum optimalnya penanganan terhadap penyakit ternak dan belum optimalnya kelembagaan peternakan. Kabupaten Langkat juga memiliki kawasan perkebunan yang cukup luas. Namun, komoditas perkebunan masih belum memiliki daya saing akibat mutu benih yang rendah dan kualitas komoditas yang belum tersertifikasi untuk masuk ke dalam rantai industri.

Perekonomian di Kabupaten Langkat yang belum berkembang pesat juga berhubungan dengan tingkat kemiskinan penduduk. Pengembangan ekonomi di Kabupaten Langkat belum cukup signifikan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk. Masih terdapat penduduk yang menganggur dan belum terserap dalam pasar kerja lokal. Persoalan pengangguran di Kabupaten Langkat diakibatkan oleh rendahnya partisipasi angkatan kerja, rendahnya perluasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum terserapnya tenaga kerja lokal pada perusahaan di Langkat.

Rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Langkat meningkatkan kebutuhan terhadap strategi ekonomi yang tidak mengandalkan penyerapan kerja secara besar-besaran. Dibutuhkan pemberdayaan masyarakat dalam



pengembangan ekonomi kreatif, meskipun pada saat ini belum berkembang optimal. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan wirausahawan baru, UMKM dan industri kecil yang lambat yang seharusnya dapat memperluas kesempatan kerja. Selain itu, pemanfaatan BUMDesa dan koperasi untuk pengembangan ekonomi juga belum optimal.

Kabupaten Langkat memiliki keunggulan wilayah secara absolut dan komparatif karena potensi sumber daya alamnya. Namun, dibutuhkan pengembangan ekonomi, SDM, dan infrastruktur untuk menciptakan daya saing kompetitif. Selain itu, dibutuhkan pula penciptaan iklim investasi yang kondusif terutama dalam pengembangan pariwisata. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Langkat belum signifikan diakibatkan oleh rendahnya iklim investasi daerah akibat regulasi dan sistem perizinan yang belum mendukung dan kurangnya promosi investasi. Belum terdapat juga rencana tata ruang yang lebih operasional dan mekanisme insentif untuk mendukung investasi ekonomi masuk ke Kabupaten Langkat. Rendahnya investasi yang masuk dan pertumbuhan sektor tersier di Kabupaten Langkat juga mengakibatkan rendahnya pendapatan daerah sehingga mengakibatkan rendahnya rasio kemandirian fiskal Kabupaten Langkat yang mengakibatkan pemerintah juga memiliki kemampuan yang rendah untuk membiayai pembangunan dan masih bergantung pada pemerintah pusat.

f). Rendahnya kinerja Infrastruktur dan Penataan Ruang Untuk Mendukung Ekonomi dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Langkat yang belum signifikan juga dipengaruhi juga oleh rendahnya kinerja infrastruktur di Kabupaten Langkat. Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Kabupaten Langkat dan banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar desa juga masih rendah akibat minimnya pengembangan jalan baru.



Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan minimnya pelayanan angkutan umum di Kabupaten Langkat. Belum seluruh wilayah di Kabupaten Langkat terlayani oleh angkutan umum dan terintegrasi. Kondisi ini mempersulit pengembangan pariwisata di Kabupaten Langkat karena aksesibilitas ke daya tarik wisata yang sulit.

Penataan ruang di Kabupaten Langkat juga belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena fokus pembangunan masih terpusat di beberapa lokasi. Akibatnya pengembangan ekonomi terutama untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan belum dapat tercipta akibat pemanfaatan ruang yang belum merata dan sesuai dengan tujuan penataan ruang.

Aksesibilitas penduduk terhadap layanan sarana prasarana dasar terutama permukiman masih rendah. Kinerja infrastruktur permukiman seperti layanan air bersih, sanitasi, dan persampahan di Kabupaten Langkat belum mencakup seluruh wilayah. Pemanfaatan peran desa dan komunitas di lingkungan perumahan belum optimal untuk melakukan pengelolaan infrastruktur tersebut. Selain itu, masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Langkat terutama di perdesaan. Persoalan ini tidak hanya mengakibatkan munculnya kawasan kumuh, tetapi juga menurunkan kualitas kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan penduduk.

g) Belum terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government).

Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan isu global yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait hal itu, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi. Kondisi eksisting di Kabupaten Langkat, penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk mendukung penciptaan good and clean governance masih belum optimal. Pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Langkat belum terwujud. Penilaian BPK terhadap akuntabilitas keuangan di Kab. Langkat masih rendah (WDP).



Penilaian akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam evaluasi AKIP masih mendapatkan nilai rendah, yaitu CC. Selain itu pelayanan publik masih belum optimal dan masih banyak terjadinya kasus korupsi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat juga belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten masih rendah.

Permasalahan penilaian BPK yang masih rendah diakibatkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang masih buruk. Sedangkan penilaian akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah juga memiliki nilai rendah akibat sistem perencanaan dan pelaporan yang masih buruk. Buruknya pelayanan publik di Kabupaten Langkat disebabkan ditunjukkan dengan adanya beberapa permasalahan seperti masih rendahnya indeks profesionalitas ASN dalam pelayanan publik, rendahnya kompetensi pegawai pemerintahan, belum memadainya sarana prasarana pelayanan publik, dan rendahnya pemanfaatan sistem informasi teknologi untuk pelayanan publik. Rendahnya pelayanan publik di Kabupaten Langkat juga belum didukung oleh sistem pengarsipan yang baik.

Pada saat ini, kebutuhan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan kelitbangan semakin meningkat. Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Langkat juga dibutuhkan untuk inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang saat ini belum mencapai prinsip good governance. Kebijakan daerah di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya didukung oleh kajian kelitbangan sehingga pendekatan research-based policy belum sepenuhnya dilakukan. Kondisi ini juga disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang mendukung sistem inovasi dan kelitbangan daerah di Kabupaten Langkat. Inovasi dan kelitbangan di Kabupaten Langkat juga dibutuhkan untuk penciptaan daya saing ekonomi di Kabupaten Langkat. Pada saat ini, produk ekonomi Kabupaten Langkat belum memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.



h). Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Perkembangan global dan kebijakan nasional telah mewajibkan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis sistem informasi teknologi. Regulasi pada tingkat nasional juga telah mengamanatkan adanya keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Pada saat ini, pemanfaatan sistem informasi teknologi di Kabupaten Langkat masih belum optimal dan menciptakan performas pelayanan publik yang rendah. Sistem informasi teknologi dan pusat data di tingkat pemerintahan kabupaten belum terintegrasi. Pada level kecamatan dan desa, pelayanan publik juga belum berbasis SIT. Hal ini disebabkan belum terjangkaunya seluruh wilayah oleh jaringan telekomunikasi dan internet. Selain itu, sarana dan prasarana sistem informasi berbasis teknologi di level kecamatan dan desa belum memadai.

Pemerintah Kabupaten Langkat juga belum optimal dalam menyelenggarakan SPB. Kabupaten Langkat belum memiliki sistem layanan informasi maupun pengaduan bagi masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan partisipasi dari masyarakat menjadi rendah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan terhadap masyarakat juga masih belum optimalnya basis data kependudukan dan pembangunan yang belum terintegrasi. Saat ini Kabupaten Langkat belum memiliki pusat data terintegrasi dan sarana dan prasarana serta SDM dengan kompetensi TIK yang mencukupi.

c. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditingkatkan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi adalah :



1. Belum optimalnya program pembangunan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan sehingga menjadi salah satu yang berkontribusi pada tingginya persentase penduduk yang tidak memenuhi wajib belajar 9 tahun dan angka partisipasi sekolah yang rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah yang digambarkan melalui rendahnya pendapatan perkapita, tingginya angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
3. Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS belum optimal dan belum berkelanjutan.
4. Masih dominannya sektor padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja belum maksimal.
5. Kurangnya fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata sehingga pengembangan sektor pariwisata cenderung lambat.
6. Belum optimalnya penyediaan barang publik yang mengindikasikan pada belum maksimalnya tata kelola pemerintahan yang ada.

d. Isu Strategis Kabupaten Langkat Tahun 2020

Berdasarkan permasalahan diatas, maka isu strategis Kabupaten Langkat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan
2. Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengentasan Permasalahan Sosial, Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban, dan Pelestarian Budaya
4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.



5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Berbasis SDA Terutama Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Ekonomi Wilayah.
6. Rendahnya kinerja Infrastruktur dan Penataan Ruang Untuk Mendukung Ekonomi dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
7. Belum terciptanya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government)
8. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
9. Permasalahan Pandemi Covid-19

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat 2019-2024 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Langkat pada akhir periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih.

Gambar 3





a. Visi

Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

**"MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN
RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN
INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN"**

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat

Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya



pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius

Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK,



perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

b. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial

Perwujudan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk menjadi masyarakat dan desa sebagai aktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan tidak hanya disentuh melalui pemberdayaan ekonomi, namun dengan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. Pemberdayaan masyarakat diawali dengan peningkatan kegiatan pembangunan di level lingkungan masyarakat, desa/kelurahan, hingga kecamatan dengan aktor pembangunan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat tersebut ditingkatkan kapasitas sehingga dapat dikembangkan menjadi masyarakat yang berdaya/mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan juga meningkatkan



peran desa dan kelurahan untuk melakukan pembangunan dari segi ekonomi, sosial, maupun fisik.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa. Misi ini akan dicapai dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi peningkatan status kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan partisipasi pemuda, pengembangan budaya lokal, serta peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah: pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kepemudaan dan olahraga; kebudayaan; pariwisata; dan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

2) Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, bertujuan untuk menyelesaikan isu kualitas SDM, yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta kualitas tenaga kerja lokal yang rendah. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Langkat juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal terutama dalam hal penyiapan pengembangan sektor pariwisata.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator utama pengukuran kualitas sumber daya manusia. Misi ini akan dicapai dengan meningkatkan



meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah: pendidikan; kesehatan; perpustakaan; dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan pengembangan sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pengembangan ekonomi pada tahun 2019-2024 lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menurunkan tingkat pengangguran dengan prioritas utama pada pariwisata. Misi ini akan dicapai dengan mengembangkan pariwisata yang diintegrasikan dengan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Langkat lainnya. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah, pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui UMKM dan IKM, peningkatan produksi pertanian, peternakan,



perkebunan, dan perikanan, peningkatan investasi daerah, dan peningkatan partisipasi Angkatan kerja dalam ekonomi lokal. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah : pariwisata; koperasi dan UMKM; perindustrian; perdagangan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; tenaga kerja; penanaman modal; dan penunjang urusan (pengelolaan pendapatan daerah).

4) Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat terkendala oleh belum optimalnya kinerja infrastruktur. Pembangunan infratsruktur di Kabupaten Langkat saat ini belum dilakukan secara strategis dan memegang prinsip berkelanjutan. Sehingga pembangunan lima tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang maupun yang akan dikembangkan, seperti pariwisata. Sebagai bentuk optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Langkat, penataan ruang dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah penurunan kesenjangan wilayah. Misi ini akan dicapai dengan meningkatkan kinerja infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi peningkatan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur ekonomi dan permukiman; pengoptimalan pemanfaatan ruang; peningkatan pengawasan kualitas lingkungan hidup, dan penurunan resiko kejadian bencana. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah : pekerjaan umum dan penataan ruang; pertanahan; perhubungan; perumahan dan kawasan permukiman; lingkungan hidup; dan bencana.



- 5) Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya mengimplementasikan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). Isu ini tercerikan dengan rendahnya kinerja pemerintah dan tingkat pelayanan publik. Pembangunan lima tahun ke depan diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis sistem informasi teknologi. Pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta inovasi di berbagai aspek pemerintahan diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan pemerintah Kabupaten Langkat.

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah penciptaan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi ini akan dicapai dengan peningkatan inovasi dan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis SIT. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah : penunjang urusan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; kearsipan; penelitian pengembangan; komunikasi dan informatika; statistik dan persandian.

c. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2019-2024. Tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan



jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD yang dirumuskan melalui berbagai pendekatan (teknokratik, politis, partisipatif, dan top-down & bottom-up). Tujuan merupakan operasionalisasi penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan juga menggambarkan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran memiliki kinerja yang diukur dalam indikator yang menunjukkan hasil (*outcomes*) dari dilaksanakannya strategi-strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 21

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019-2024

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL (2018/2019)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			INDIKATOR	SATUAN		2020	2021	2022	2023	2024	
MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	Misi 1 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	Tujuan 1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	10,2 (2018)	9,8	9,6	9,4	9,2	9	9
			Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	9	10	11	12	13	13
	Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM	Tujuan 2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	IPM	Poin	70,27 (2018)	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
	Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	Tujuan 3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	LPE	Persen (%)	5,02 (2018)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5
			TPT	Persen (%)	4,67	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,7
	Misi 4 : Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	Tujuan 4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	Poin	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21
			Indeks Williamson	Poin	0,607	0,59	0,58	0,57	0,56	0,52	0,52
	Misi 5 : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Tujuan 5.1 : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	60,00	62,00	64,00	66,00	70,00	70,00

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024



Tabel 22

Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019-2024

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL (2018/2019)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				INDIKATOR	SATUAN		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Misi 1 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	Tujuan 1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial		Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	10,2 (2018)	9,8	9,6	9,4	9,2	9	9
				Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	9	10	11	12	13	13
			1.1.1 Meningkatnya status desa	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM)								
				- Desa Maju	Desa	8	10	12	16	18	22	22
				- Desa Berkembang	Desa	193	192	191	187	184	179	179
				- Desa Tertinggal	Desa	38	35	32	29	26	23	23
				- Desa Sangat Tertinggal	Desa	1	1	1	0	0	0	0
			1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PMKS	Orang	4085	3268	2468	1968	1468	968	968
				Indeks Pembangunan Gender	Poin	68	68,02	68,06	68,08	70,03	70,08	70,08
			1.1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda :	Medali/Piala	127	147	169	187	220	254	254
				- Internasional	Medali/Piala	13	18	22	27	35	45	45
				- Nasional	Medali/Piala	5	9	12	15	25	29	29
				- Daerah	Medali/Piala	109	120	135	145	160	180	180
			1.1.4 Meningkatnya pengembangan budaya lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	%	3	5	10	15	20	25	25
			1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	50	55	60	65	70	80	80
			1.1.6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	n/a	40	45	50	55	60	60



2.	Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Tujuan 2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan		IPM	Poin	70,27 (2018)	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
			2.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52 (2018)	8,76	8,82	8,88	8,94	9	9
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75 (2018)	12,8	12,9	13	13,1	13,2	13,2
				APK SD/MI Sederajat	%	110,43 (2017/2018)	111,534	112,64 964	113,77 614	114,913 901	116,06 304	116,06304
				APM SD/MI Sederajat	%	94,28 (2017/2018)	95,2228	96,27 0251	97,473 629	98,740 7861	100	100
				APK SMP/MTS Sederajat	%	106,99 (2017/2018)	108,06	109,1 405	110,231 9	111,334 223	112,447 565	112,44756 5
				APM SMP/MTS Sederajat	%	79,59 (2017/2018)	81,5798	83,61 9244	85,70 9725	87,852 468	90,048 7797	90,04877 9 7
			2.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,22 (2018)	68,5	68,75	69	69,5	70	70
				Prevalensi Gizi Buruk	%	0,09	0	0	0	0	0	0
				TFR (Total Fertility Rate)	%	2,76	2,6	2,57	2,56	2,55	2,54	2,54
3.	Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	Tujuan 3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah		LPE	Persen (%)	5,02 (2018)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5
				TPT	Persen (%)	4,67	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,7
			3.1.1 Meningkatnya kunjungan wisawatan dan pendapatan dari wisata	Tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	12	12	12	15	20	20
				Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan minum) pada PDRB (ADHB)	%	2,28 (2018)	2,4	2,43	2,6	2,75	2,79	2,79
			3.1.2 Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	Tingkat Pertumbuhan UMKM	%	11,3	11,5	12	13	14	15	15
				Tingkat Pertumbuhan IKM	%	n/a	2,99	3,04	3,1	3,16	3,25	3,25
			3.1.3 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Skor PPH	Poin	89,6	89,8	89,9	90	90,1	90,2	90,2
				Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB (ADHB)	%	35,06	35,56	36,06	36,56	37,06	37,56	37,56
				Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB (ADHB)	%	3,12	3,37	3,62	3,87	4,17	4,47	4,47



			3.1.4 Meningkatnya investasi daerah	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	Persen (%)	5	6	7	8	9	9	8
			3.1.5 Meningkatnya penguatan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	%	1,71	2,5	3,5	4,5	5,5	6,97	6,97
			3.1.6 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi lokal	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha	%	n/a	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,0
				Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	%	n/a	20	21	23	24	25	25
4.	Misi 4 : Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	Tujuan 4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan		Indeks Gini	Poin	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21
				Indeks Williamson	Poin	0,607	0,59	0,58	0,57	0,56	0,52	0,52
			4.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah	Km/km ²	0,274	0,275	0,277	0,278	0,280	0,282	0,282
				Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	50,11	52	54	56	59	63	63
	kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	n/a	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
				Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	level 3	level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			5.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	Nilai Indeks SPBE	Poin	2,51	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,00
				Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	n/a	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,6 (2018)	76,88	78,16	79,44	80,72	82,00	83,28

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024



3. Strategi, Arah, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Langkat juga mempertimbangkan penciptaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi dan inovasi.

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang terinci sebagai berikut :

Tabel 23

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Langkat 2019-2024

VISI : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial		
1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	1.1.1 Meningkatnya status desa	1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan
		2. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi
	1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan PMKS
		2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
		3. Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber



		kesejahteraan sosial
	1.1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam aktivitas kepemudaan dan olahraga
	1.1.4 Meningkatnya pengembangan budaya lokal	1. Meningkatkan pemanfaatan wadah-wadah aktualisasi keagamaan 2. Mengintensifkan keikutsertaan masyarakat dalam kompetisi keagamaan 3. Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal 4. Meningkatkan pengembangan budaya lokal melalui pariwisata
	1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	1. Meningkatkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat 2. Meningkatkan rasa solidaritas masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan 3. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat
	1.1.6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	1. Meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level desa/kelurahan
Misi 2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		
2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	2.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	1. Meningkatkan pendidikan penduduk untuk memenuhi wajib pendidikan dasar 9 tahun
		2. Meningkatkan mutu pendidikan dasar
		3. Meningkatkan literasi penduduk
	2.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1. Meningkatkan kondisi gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat, serta keselamatan melahirkan.
		2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan
		3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan kesehatan
		4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		5. Meningkatkan akses masyarakat pada layanan KB
Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata		
3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	3.1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pendapatan dari wisata	1. Mengembangkan potensi pariwisata daerah
		2. Meningkatkan pengembangan industri pariwisata
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata
	3.1.2 Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	1. Meningkatkan kemudahan UMKM untuk menjalankan usaha
		2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan lainnya

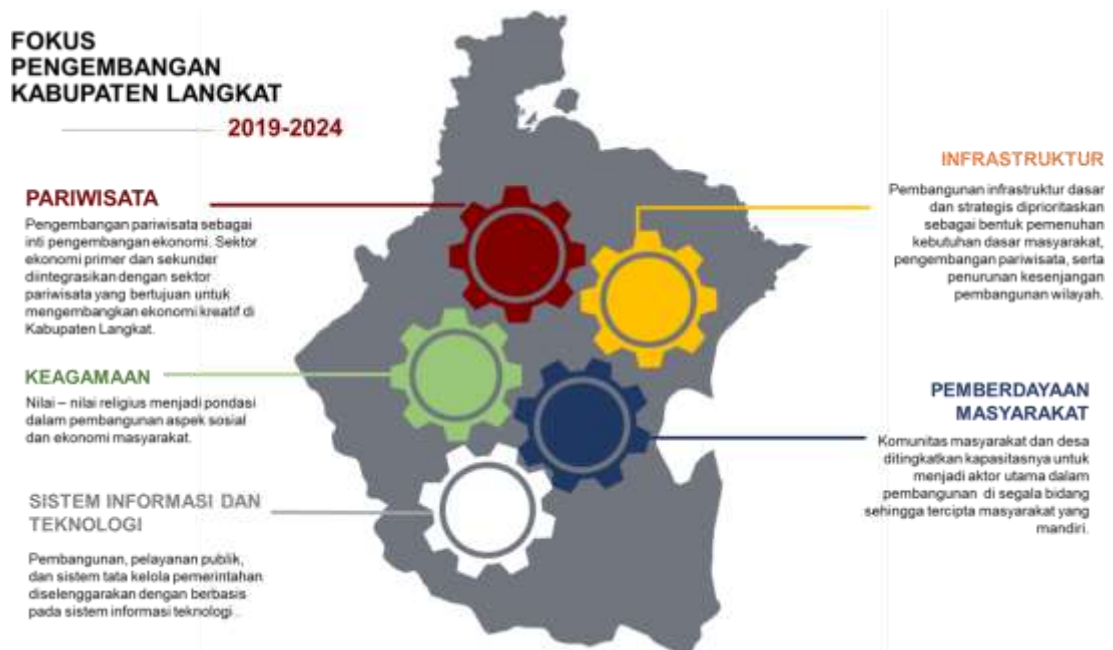


		3. Meningkatkan daya saing industri
		4. Meningkatkan pemasaran produk UMKM dan IKM
	3.1.3 Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	1. Meningkatkan kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan
		2. Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan
		3. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
		4. Meningkatkan produktivitas peternakan
		5. Meningkatkan daya saing komoditas perkebunan
		6. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan
		7. Meningkatkan daya saing perikanan
		8. Meningkatkan kinerja infrastruktur perairan untuk mendukung produktivitas pertanian
	3.1.4 Meningkatkan investasi daerah	1. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif
	3.1.5 Meningkatkan penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	2. Meningkatkan realisasi PAD
	3.1.6 Meningkatkan partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi lokal	1. Meningkatkan kompetensi kewirausahaan masyarakat
		2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal
		3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Misi 4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan		
4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup	4.1.1 Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	1. Meningkatkan penyediaan jalan kabupaten
		2. Meningkatkan kualitas jaringan jalan
		3. Meningkatkan pelayanan angkutan jalan umum
	4.1.2 Meningkatkan kinerja infrastruktur permukiman	1. Mengurangi kawasan kumuh
		2. Meningkatkan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin
		3. Meningkatkan cakupan layanan air bersih
		4. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi
		5. Meningkatkan cakupan layanan persampahan
	4.1.3 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Menyediakan rencana tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan
	4.1.4 Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengawasan penurunan kualitas lingkungan hidup
		2. Meningkatkan kesadaran badan usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
	4.1.5 Menurunnya resiko kejadian bencana	1. Meningkatkan kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana
		2. Menurunkan tingkat kerentanan wilayah
		3. Meningkatkan penanganan kejadian kebakaran
		4. Menurunkan tingkat potensi kejadian bencana banjir
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan	5.1.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah
		2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan

peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi		pembangunan daerah
		3. Meningkatkan keterpaduan perencanaan dengan kelitbangan untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah
		4. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah
		5. Mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan dan kinerja
	5.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	1. Meningkatkan tata kelola SPBE di level pemerintah daerah
		2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK
		3. Mengintegrasikan pelayanan berbasis TIK pada tingkat desa
		4. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
		5. Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
		6. Meningkatkan pengelolaan kearsipan berbasis TIK
		7. Membangun sistem pengelolaan data pembangunan daerah berbasis TIK

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Langkat 2019-2024 yang telah dirumuskan, ditentukan beberapa fokus pengembangan inti (*core*) yang menjadi panduan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan ke depan sebagaimana digambarkan berikut :

Gambar 4
Fokus Pengembangan Langkat 2019-2024



Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024



4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari fokus pengembangan yang telah ditentukan kemudian dirumuskan tema pembangunan setiap tahun sebagaimana digambarkan berikut :

Tabel 24

Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
1	2020	Peningkatan layanan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata
2	2021	Peningkatan pembangunan infrastruktur strategis dan pariwisata dan layanan publik berbasis TIK
3	2022	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA untuk mendukung pengembangan pariwisata
4	2023	Pengintegrasian sektor ekonomi unggulan (pertanian, industri, dan perdagangan) untuk mendukung pengembangan pariwisata
5	2024	Pemantapan kinerja infrastruktur untuk menurunkan kesenjangan wilayah dan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024



Dari fokus pengembangan dan tema pembangunan yang telah ditentukan kemudian dirumuskan arah kebijakan yang telah dirumuskan membentuk suatu gambaran arah pembangunan per tahun berikut :

Tabel 25
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Langkat 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN				
2020	2021	2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem informasi dan database berbasis TIK untuk pelayanan publik - Peningkatan partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar - Peningkatan layanan infrastruktur pendidikan dan kesehatan - Pembangunan destinasi dan aksesibilitas pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK - Peningkatan partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar - Peningkatan kompetensi tenaga kerja - Peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dan pariwisata - Peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan SDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK - Peningkatan partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar dan kompetensi tenaga kerja - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan - Penyiapan integrasi sektor ekonomi unggulan (pertanian, industri, dan perdagangan) untuk mendukung pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jejaring dalam tata kelola pemerintahan - Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata dan ekonomi unggulan - Pengembangan kelembagaan pariwisata - Pengintegrasian sektor ekonomi unggulan (pertanian, industri, dan perdagangan) untuk mendukung pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk peningkatan ekonomi penduduk - Pemantapan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kesejahteraan penduduk - Pemantapan kinerja infrastruktur untuk menurunkan kesenjangan wilayah dan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024

III. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Langkat berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didasarkan kepada :



- ✓ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ✓ Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal.

2. Kebijakan Umum Daerah Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kabupaten Langkat menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai Penerapan dan Pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

2.1 Pendidikan

- ❖ Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
- ❖ Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

2.2. Kesehatan

- ❖ Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pemda sebagai instansi teknis yang akan mengawal penyelenggaraan BG dan implementasi Perda BG;
- ❖ Ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan, potensi. Tantangan. Arah pembangunan daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah)
- ❖ Kesiapan kelembagaan penyelenggaraan BG dan SOP-nya.
- ❖ Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10%;
- ❖ Memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien.



2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- ❖ Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat;
- ❖ Peningkatan infrastruktur jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan;
- ❖ Meningkatnya kemantapan jalan provinsi menjadi 80 persen dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen; dan
- ❖ Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
- ❖ Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem.
- ❖ Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
- ❖ Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi.
- ❖ Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim.
- ❖ Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.
- ❖ Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat;
- ❖ Peningkatan infrastruktur jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan;
- ❖ Meningkatnya kemantapan jalan provinsi menjadi 80 persen dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen; dan



- ❖ Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

2.4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- ❖ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
- ❖ Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
- ❖ Infrastruktur dasar dan konektivitas; kekurangan tempat tinggal (blacklog) berdasarkan perspektif menghuni;
- ❖ Pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); akses sanitasi layak pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;

2.5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- ❖ Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- ❖ Penanganan1 (satu) pintu dan kerjasama dengan Dinas Sosial.
- ❖ Pengembangan Sistem Informasi Deteksi Gangguan Ketertiban Umum Lintas Daerah.
- ❖ Realokasi DAK untuk rehabilitasi dan pengembangan rumah/panti social masyarakat PGOT.
- ❖ Relokasi DAK untuk dukungan kinerja Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2.6. Sosial

- ❖ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.



- ❖ Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- ❖ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

3. Gambaran Orientasi dan Komitmen Pemerintah Daerah

Memperhatikan kebijakan diatas, dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Prioritas Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

3.1. Pendidikan

- ❖ Memperhatikan kondisi demografi dan kekhasan daerah;
- ❖ Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan serta p menuhan SDM pendidikan;
- ❖ Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM pendidikan;
- ❖ Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN tahun 2015-2019; dan
- ❖ Menganggarkan 20 (dua puluh) persen untuk fungsi pendidikan dari APBD

3.2. Kesehatan

- ❖ Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10%;
- ❖ Mem anfaatkan alokasi anggaran baik APB D dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien;
- ❖ Mem perhatikan jalur distribusi obat dan v aksin
- ❖ Kesiapan kelembagaan penyelenggaraan BG dan SOP-nya.
- ❖ Mem astikan ketersediaan obat (Buffer stock);
- ❖ Melakukan pemantauan/monitoring ketersediaan alat kesehatan, obat, dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan;



- ❖ Melakukan pengawasan alat kesehatan, menerbitkan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga ; dan
- ❖ Memperhatikan mekanisme pengendalian dan pemantauan dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan minuman yang beredar di masyarakat.

3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Tercapainya persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, tercapainya pembangunan SP ALD dan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, tercapainya pengembangan SPLAD;
- 2) Sampah : pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas permukiman layak dan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah. Pengembangan TPA yang ber wawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional; dan
- 3) Drainase : mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem konprehensif. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan. Mewujudkan pengelolaan drainase dengan memperhatikan konservasi SDA. Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan strategis perkotaan untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kabupaten/kota, melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air. Pengurangan genangan di kawasan perumahan dan permukiman. Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang layak, sehat dan bersih. Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat.



3.4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- ❖ Terasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga;
- ❖ Terasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; penyediaan rumah susun sewa; penyediaan KPR swadaya.
- ❖ Terasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; bantuan stimulan bangunan baru rumah swadaya.
- ❖ Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah.
- ❖ Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.
- ❖ Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan keswadayaan masyarakat di kelurahan.

3.5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- ❖ Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- ❖ Penyusunan kajian risiko bencana.
- ❖ Penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- ❖ Sosialisasi informasi kemungkinan dampak bencana;
- ❖ Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.



- ❖ Penyusunan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (RTDK).
- ❖ Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (mitigasi).
- ❖ Penyuluhan, penyebaran informasi pelanggaran dan peringatan waspada bahaya kebakaran.
- ❖ Pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran (Pusdalops).
- ❖ Pembentukan desa tangguh bencana.
- ❖ Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran.
- ❖ Pembuatan rencana kontijensi.
- ❖ Pelatihan/simulasi kesiapsiagaan aparat ur dan masyarakat.
- ❖ Kajian risiko kebakaran dan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).
- ❖ Pengadaan peralatan perlindungan dan perencanaan pembangunan akses perlindungan bencana kebakaran.
- ❖ Inspeksi sistem keselamatan kebakaran.
- ❖ Penyusun kebijakan/regulasi tentang bencana dan kebakaran.
- ❖ Membuat posko tanggap kebakaran.
- ❖ Pencarian dan penyelamatan korban bencana.
- ❖ Evakuasi/pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara.
- ❖ Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran.
- ❖ Membentuk Poskotis (Pos Komando Teknis).
- ❖ Kaji cepat/size up.
- ❖ Operasi pemadaman.
- ❖ Pencarian dan penyelamatan korban kebakaran.
- ❖ Evakuasi/pemindahan korban kebakaran dari lokasi kebakaran ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan.



- ❖ Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
- ❖ Penyusunan peta dan kajian risiko bencana.
- ❖ Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.
- ❖ Pembangunan sistem data informasi kebencanaan daerah.
- ❖ Sosialisasi kesadaran terhadap bencana.
- ❖ Gladi dan simulasi kebencanaan.
- ❖ Diseminasi informasi kebencanaan daerah dan PUSDALOPS.
- ❖ Integrasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan PUSDALOPS.
- ❖ Penyediaan layanan komunikasi kedaruratan dan PUSDALOPS.
- ❖ Penyusunan peta dan kajian risiko bencana.
- ❖ Penyusunan dan rivi u rencana penanggulangan bencana.
- ❖ Penyusunan rencana kontijensi.
- ❖ Penetapan kawasan rawan bencana geologi, wilayah sungai, dan pesisir.
- ❖ Pembuatan rambu dan papan peringatan bencana.
- ❖ Pembentukan relawan penanggulangan bencana.
- ❖ Desa tangguh bencana.
- ❖ Penyediaan logistik kebencanaan.
- ❖ Penyediaan peralatan dasar kebencanaan
- ❖ Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.

3.6. Sosial

- ❖ Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan Kemiskinan melalui pemenuhan ke butuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal; serta Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.